

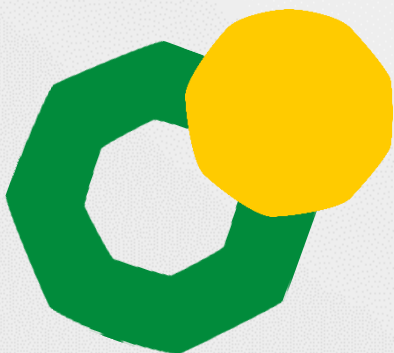


DJKN
KANWIL BALINUSRA

LAPORAN KINERJA

KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA

2024



KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA

Gedung Keuangan Negara | Denpasar Lantai 3, Jl. Dr. Kusuma Atmaja, Denpasar 80235
Telepon (0361) 235454, 226703

PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya. Laporan Kinerja dimaksud sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada Tahun 2024. Penyusunan LAKIN Kantor Wilayah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan pada umumnya dan DJKN pada khususnya, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara telah menerapkan sistem *Balance Scorecard (BSC)* sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. *Performance* Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2024. Dalam LAKIN 2024 dilakukan berdasarkan hasil capaian IKU seluruh kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara sesuai dengan Peta Strategis Kanwil Balinusra Tahun 2024.

Harapan kami LAKIN Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban, sebagaimana harapan pengguna layanan dalam peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dengan dilandasi oleh Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan. Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) telah mencapai pada angka 115,49%.

Apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan laporan akuntabilitas kinerja ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Denpasar, 17 Februari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Sudarsono



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanat didalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas dibidang kekayaan negara, penilaian dan lelang.

Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara adalah salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dituntut untuk mampu menghadirkan sikap yang prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien yang harus selaras dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Laporan Kinerja Tahun 2024 disusun sebagai cerminan dari salah satu prinsip akuntabilitas yang merupakan salah satu perwujudan dari prinsip *good governance*.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan PMK nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kanwil menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
- b. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;

- d. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
- e. pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, dan evaluasi, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
- f. pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- g. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- h. pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;
- i. penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
- j. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
- k. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
- l. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan PMK nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Bidang Penilaian;
- d. Bidang Piutang Negara;
- e. Bidang Lelang;
- f. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara meliputi 3 provinsi yaitu :

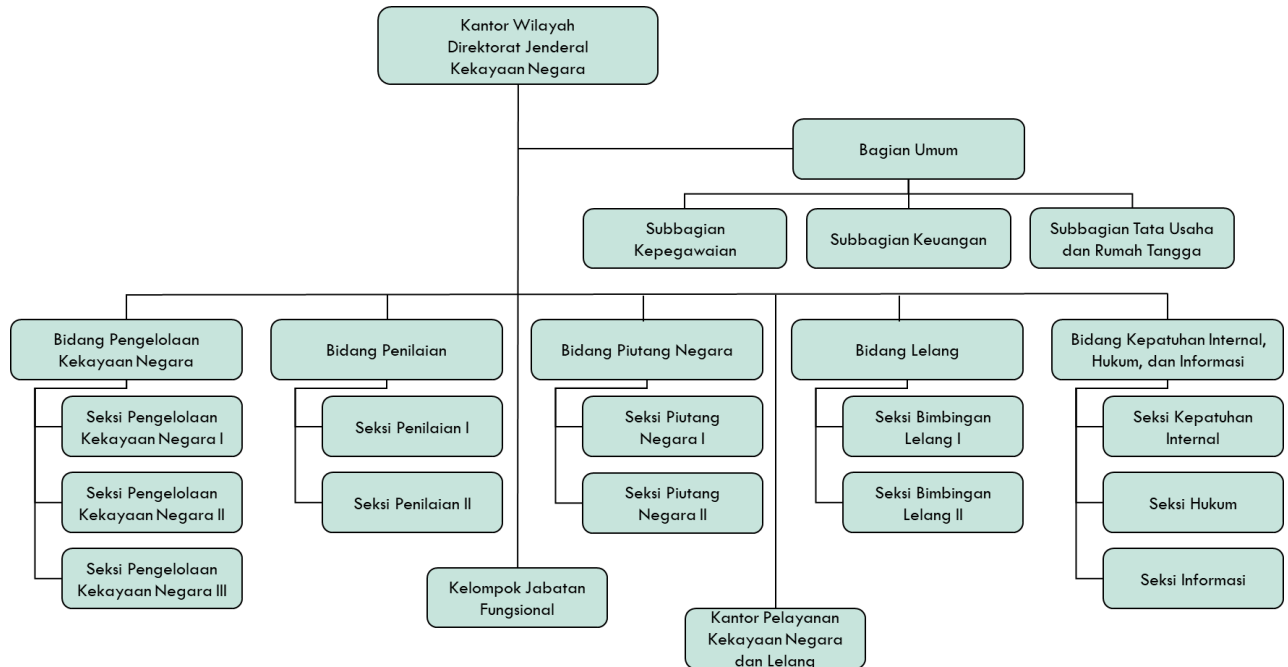
- a. Propinsi Bali;
- b. Propinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- c. Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara membawahi 5 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yaitu :

- a. KPKNL Denpasar;
- b. KPKNL Singaraja;
- c. KPKNL Mataram;
- d. KPKNL Bima; dan
- e. KPKNL Kupang.

Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dapat di gambarkan seperti di bawah ini:

Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara



Sumber daya manusia yang ada di wilayah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara sampai dengan akhir tahun 2024 untuk mendukung tugas dan fungsi DJKN sebanyak 186 pegawai masing-masing terdiri dari pegawai Kanwil sebanyak 42 pegawai, KPKNL Denpasar sebanyak 37 pegawai, KPKNL Singaraja sebanyak 29 pegawai, KPKNL Mataram sebanyak 26 pegawai, KPKNL Bima sebanyak 26 pegawai dan KPKNL Kupang sebanyak 28 pegawai dengan komposisi per golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut:

Tabel SDM di Lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara per Golongan

Satuan Kerja	Golongan			
	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Jumlah
Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara	15	26	1	42
KPKNL Denpasar	3	32	2	37
KPKNL Singaraja	1	21	7	29
KPKNL Mataram	1	18	7	26
KPKNL Bima	2	15	7	24
KPKNL Kupang	1	20	7	28

Tabel SDM di Lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara per jabatan

Satuan Kerja	Jabatan				
	Es II	Es III	Es IV	Jabatan Fungsional	Pelaksana
Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara	1	6	15	3	17
KPKNL Denpasar	-	1	5	14	17
KPKNL Singaraja	-	1	5	7	16
KPKNL Mataram	-	1	4	8	13
KPKNL Bima	-	1	5	4	14
KPKNL Kupang	-	1	5	6	16

Tabel SDM di Lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara sesuai pendidikan)

Satuan Kerja	Pendidikan					
	S3	S2	S1	D3	D1	SMU
Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara	-	15	16	4	4	3
KPKNL Denpasar	-	5	22	5	3	2
KPKNL Singaraja	-	3	15	7	2	2
KPKNL Mataram	-	2	15	7	1	1
KPKNL Bima	1	4	9	8	1	1
KPKNL Kupang	-	2	17	5	1	3

C. Peran Strategis

Sebagai unit eselon II di Lingkungan DJKN yang melaksanakan tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN)

Peran Bidang PKN dalam pelaksanaan tugas-tugas Kanwil adalah terwujudnya bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kekayaan negara, serta pengoordinasian penatausahaan barang milik negara pada KPKNL di lingkungan Kanwil secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2. Bidang Penilaian

Peran Bidang Penilaian dalam pelaksanaan tugas-tugas Kanwil adalah terwujudnya bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian yang cepat, tepat, dan cermat di lingkungan Kanwil.

3. Bidang Piutang Negara

Peran Bidang Piutang Negara dalam pelaksanaan tugas-tugas Kanwil adalah terwujudnya bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan

piutang negara, pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi pemerintah daerah, pertimbangan dan penetapan atas usul restrukturisasi piutang negara, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, permintaan keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, serta penyiapan bahan penetapan persetujuan/penolakan keringanan hutang, bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan, pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, penyiapan pengolahan data, monitoring pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara secara baik sehingga tercapai pengurusan piutang negara yang optimal.

4. Bidang Lelang

Peran Bidang Lelang dalam pelaksanaan tugas-tugas Kanwil adalah terwujudnya bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Pejabat Lelang dan Jasa Lelang di lingkungan Kanwil yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja 2024 ini kami sajikan dengan sistematika laporan sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan
Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, peran strategis, dan sistematika laporan.
2. Bab II : Perencanaan Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, perjanjian kinerja, dan pengukuran kinerja.
3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja, kondisi dan permasalahan, upaya yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai, serta realisasi anggaran.
4. Bab IV : Penutup
Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan langkah - langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan dimana berada. Dalam mengemban tugas dan fungsi, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Kantor Pusat DJKN serta KPKNL yang berada dibawah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, yang merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN, yaitu:

”Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel.

Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 4 (mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) dan nomor 2 (mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif) melalui Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Terdapat 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN mempunyai sasaran strategis yang ditetapkan. Sasaran strategis merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Sesuai dengan Renstra DJKN Tahun 2020-2024, sasaran strategis DJKN yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Untuk mewujudkan kelembagaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang best fit, pada tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara akan mendukung dan melaksanakan kebijakan kelembagaan dari Kementerian Keuangan sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

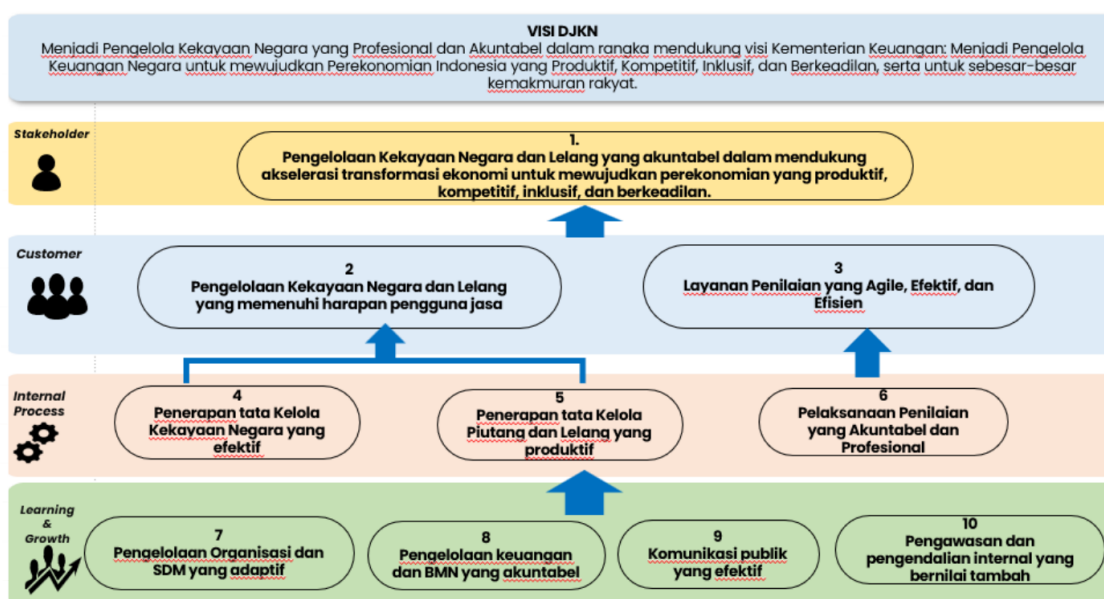
B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Hal ini selaras dengan program pengelolaan kinerja yang telah dilaksanakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang didasarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, telah dirumuskan sasaran strategis Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang tertuang dalam Peta Strategi Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Peta strategi tersebut menerapkan 4 perspektif, yaitu:

1. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder.
2. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan.
3. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan.
4. *Learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Adapun peta strategi dan perjanjian kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan	1a-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp82.503.800.000)
		1b-CP Indeks integritas	89,17
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-N Tingkat optimalisasi pengelolaan asset negara	100
		2a1-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2a2-N Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp1.383.822.000.000)
		2c-CP Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (Rp7.450.000.000)

3.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	3a-N	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
4.	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100
		4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
5.	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	76 (1.910 BKPN)
		5b-CP	Persentase produktivitas lelang	89
6.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	6a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
7.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	7a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
		7b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100
		7c-N	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	75
8.	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		8b-N	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10
9.	Komunikasi Publik yang Efektif	9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55
		9b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
10.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	10a-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82
		10b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan ZI-WBK/WBBM	100

Dalam tahun anggaran 2024, telah dilakukan adendum perjanjian kinerja Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, dengan rincian sebagai berikut:

1. Melakukan *adjustment* target *raw data* indikator kinerja “Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang” dari target semula 82,50 M menjadi 83,63 M.

2. Melakukan *adjustment target raw data* indikator kinerja “Persentase penurunan outstanding piutang negara” dari target semula 7,45 M terakhir menjadi 23,28 M.
3. Melakukan *adjustment* indikator kinerja “Persentase saldo berkas kasus piutang negara” dari target semula 76 menjadi 75 dan target *raw data* dari semula 1.910 berkas menjadi 1.883 berkas.
4. Melakukan *adjustment* perubahan trajectory IKU serta melakukan perubahan wording IKU sesuai arahan dari Kantor Pusat DJKN dan/atau akibat dari adendum perjanjian kinerja.

C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2024, DJKN berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

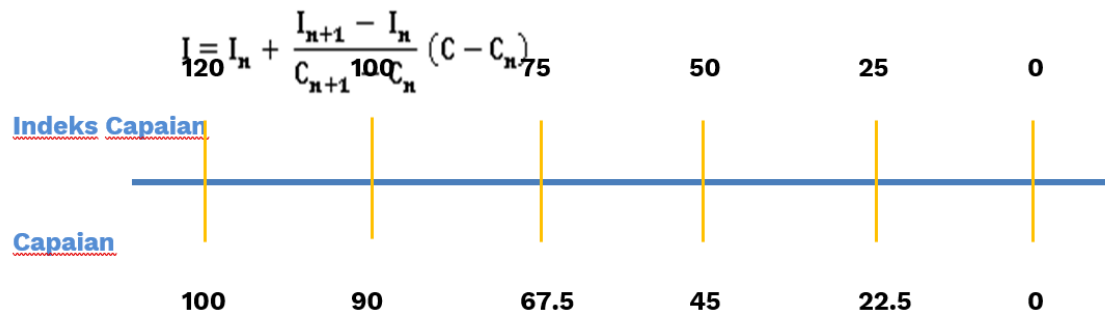
1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dihitung berdasarkan formula sesuai dengan jenis polarisasi IKU;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi Maximize

$$\text{Indeks Capaian} = (\text{Realisasi}/\text{Target}) \times 100 \%$$
 IKU yang memiliki polarisasi maximize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.
2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi Minimize

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$
 IKU yang memiliki polarisasi minimize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.
3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*



I_n = Indeks capaian
 I_{n-1} = Indeks capaian dibawahnya
 I_{n+1} = Indeks capaian diatasnya
 C_a = Capaian awal
 C_n = Realisasi/target x 100%
 C_{n+1} = Capaian dengan ketentuan :

- Apabila Realisasi > Target, maka:
 $C_n = 100 - (C_a - 100)$, dimana C_a maksimum adalah 200%
- Apabila Realisasi < Target, maka :
 - C_n = Capaian awal
 - C_{n-1} = Capaian dibawahnya
 - C_{n+1} = Capaian diatasnya

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara tahun 2024 sebesar **115,49%**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara

Perspektif	2023		2024	
	Bobot (%)	Nilai (%)	Bobot (%)	Nilai (%)
Stakeholder	30	33,78	30	33,17
Customer	20	22,87	20	23,76
Internal Process	25	29,42	25	28,81
Learning & Growth	25	29,44	25	29,75
TOTAL NKO		115,51		115,49

Catatan Status NKO :

NKO > 100 = Istimewa

$90 \leq \text{NKO} \leq 100$ = Baik

$70 \leq \text{NKO} < 90$ = Butuh perbaikan

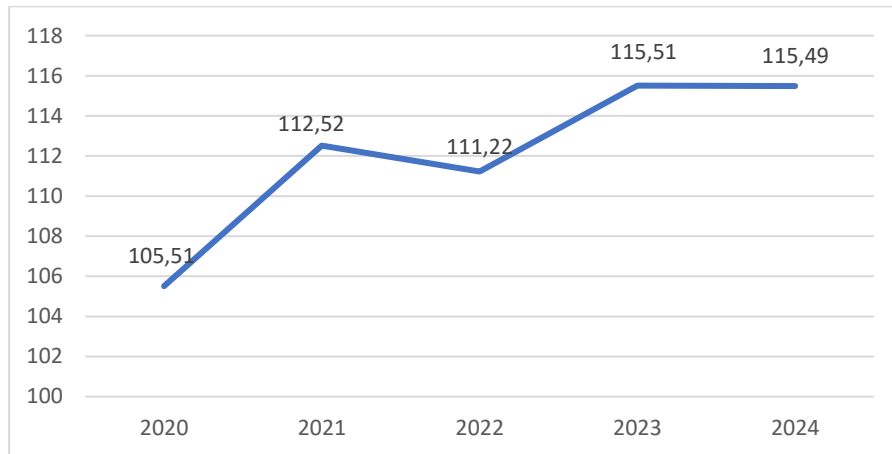
$50 \leq \text{NKO} < 70$ = Kurang

NKO < 50 = Sangat kurang

Pada tahun 2024, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara telah menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dengan manajemen kinerja dan risiko yang baik, 20 IKU yang telah ditetapkan tahun 2024 tersebut dapat tercapai sama dengan/melebihi target, dengan status semua IKU berwarna hijau, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,49. Tren NKO dalam 5 tahun terakhir dan hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara tahun 2024 dapat dilihat berikut:

Tren Kinerja NKO Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara 5 Tahun Terakhir



Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Indeks Capaian (Max. 120%)
Stakeholder Perspective (30%)					33,17%
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan				110,60%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	131,06%	120%
1b-CP	Indeks Integritas	P/L	89,17	92.44	103,67%
Customer Perspective (20%)					23,76%
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa				117,59%
2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	P/M	100%	146,91%	120%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	138,60%	120%

2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	P/M	100%	112,77%	112,77%
3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien				120%
3a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	P/M	75	106,76	120%
Internal Process Perspective (25%)					28,81%
4	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif				114,18%
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100%	108,36%	108,36%
4b-CP	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/M	100%	127,60%	120%
5	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif				111,52%
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	75%	72,72%	103,04%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	89%	115,30%	120%
6	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional				120%
6a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	16%	0,76%	120%
Learning & Growth Perspective (25%)					29,75%
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				117,44%
7a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	P/M	85	95,48	112,33%
7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120%	120%
7c-N	Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	P/M	75%	154,27%	120%
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel				120%
8a-CP	Indeks kinerja anggaran	P/M	100	120	120%
8b-N	Persentase deviasi data PNPB fungsional DJKN	P/M	10%	0%	120%
9	Komunikasi publik yang efektif				120%
9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	P/M	3,55	5,23	120%
9b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80	100	120%
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah				118,50%
10a-N	Indeks efektivitas UKI	P/M	82	95,94	117%

10b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu)	P/M	100	120	120%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					115,49%

Sebagaimana tertera pada tabel diatas, pada tahun 2024 Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara berhasil memperoleh NKO 115,49% dimana capaian dengan nilai tersebut menandakan kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2024 berhasil memenuhi ekspektasi organisasi. Penjelasan capaian indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel Dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi Untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan

Sasaran strategis ini menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara dengan prinsip akuntabilitas dalam mendukung visi Kementerian Keuangan. DJKN sebagai pengelolaan kekayaan negara dapat memberikan kontribusi dan nilai tambah atas pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tercapainya kondisi sasaran strategis di indikasikan dari nilai indeks integritas organisasi, indeks survey kepuasan pengguna layanan dan *stakeholder*, kontribusi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang, serta efektivitas dari kerja sama keuangan internasional.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mengidentifikasi 2 indikator kinerja yaitu:

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	
1	SS: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan			110,60%	
	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	131,06%	120%
	1b-CP	Indeks Integritas	87,17	92,44	103,67%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. (1a-CP) Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Indikator kinerja persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang merupakan penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang berasal dari:

1. PNBP Kekayaan Negara (PNBP Aset)
 - a. penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada Kementerian dan/atau Lembaga bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan;
 - b. penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada Kementerian dan/atau Lembaga bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
2. PNBP Piutang Negara (PNBP PN)
 - a. Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
3. PNBP Lelang
 Nilai hasil pelayanan lelang berupa:
 - a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh PL II dan Pegadaian;
 - b. bea lelang batal atas permintaan penjual;
 - c. biaya permohonan lelang;
 - d. denda keterlambatan penysetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
 - e. uang jaminan pembeli wanprestasi;
 - f. Perijinan Balai Lelang dan PL II;
 - g. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang;
 - h. kertas security untuk pembuatan kutipan risalah lelang bagi PL II;
 - i. Penggantian surat perijinan Balai lelang dan PL II yang hilang/rusak.

Adapun *trajectory* indikator kinerja persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

T/R	SS 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							Pol/KP
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	137,63%	144,22%	144,22%	114,97%	114,97%	131,06%	131,06%	
Capaian	137,63%	144,22%	144,22%	114,97%	114,97%	131,06%	131,06%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	114,97%	114,97%	120%	120%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja

Unit Eselon I.

Rincian besarnya realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Target PNB	Realisasi PNB BMN	Realisasi PNB PN	Realisasi PNB Lelang	Total Realisasi PNB
KPKNL Denpasar	42.380.200.000	17.795.566.242	824.498.511	549.345.714	57.144.509.681
KPKNL Singaraja	6.192.000.000	3.477.013.259	455.039.118	38.524.444.928	8.631.269.018
KPKNL Mataram	9.766.000.000	8.251.597.971	7.913.565	4.699.216.641	11.919.531.559
KPKNL Bima	6.646.800.000	6.152.143.640	28.197.264	3.660.020.023	9.295.025.463
KPKNL Kupang	18.322.100.000	12.983.422.418	9.231.487	3.114.684.559	22.070.694.250
Pejabat Lelang Kelas II	325.000.000	-	-	9.078.040.345	549.345.714
Kanwil DJKN Balinusra	83.632.100.000	48.659.743.530	1.324.879.945	59.625.752.210	109.610.375.685

*PNB BMN = PNB aset

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%	100%	100%	100%	-	131,06%
2023	100%	100%*	100%*	100%*	-	118,62%
2022	100%	100%*	100%*	100%*	-	117,80%
2021	100%	100%*	100%*	100%*	-	133,77%
2020	100%	100%*	100%*	100%*	-	77,60%

*sumber: LAKIN DJKN 2023

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNB Aset telah dilakukan *extra effort* berupa penggalan potensi PNB aset melalui survei kesesuaian standar biaya dan standar kebutuhan untuk mengetahui aset-aset yang memiliki potensi pemanfaatan.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja, persentase realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNB piutang negara telah dilakukan *extra effort* berupa pendampingan/asistensi kegiatan pengurusan piutang negara melalui pengurusan sederhana kepada KPKNL dalam kegiatan penagihan kepada debitur di lapangan serta koordinasi dengan

penyerah piutang membahas solusi penyelesaian piutang yang diurus PUPN.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN lelang, telah dilakukan *extra effort* yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan PL II baik melalui Telepon, WAG, Zoom, Teams Meeting dan lain sebagainya.
2. Berkoordinasi dengan pemohon lelang dari Perbankan dalam rangka meningkatkan realisasi capaian PNBPN lelang.
3. Melaksanakan penggalan potensi lelang terhadap Perbankan.
4. Mengadakan lelang expo.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN aset berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pemahaman para unit kuasa pengguna barang terhadap ketentuan terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan aset yang baik.
2. Adanya bantuan pelaksanaan penilaian dari Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dalam rangka penyelesaian permohonan pemanfaatan dan pemindahtanganan.

Realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN piutang negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Percepatan penyelesaian berkas kasus piutang negara untuk melakukan angsuran/pelunasan melalui crash program keringanan hutang.
2. Sinergi dengan instansi lain dan perangkat adat dalam kegiatan penagihan (antara lain pecalang, aparat desa, dukcapil, dan ATR/BPN, dan kepolisian).

Realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang continues improvement.
2. Pelaksanaan rangkaian lelang expo dalam rangka peringatan hari lelang.
3. Bersama dengan direktorat lelang dan KPKNL melakukan sosialisasi aplikasi lelang.go.id V2.
4. Mou dan koordinasi intensif dengan *stakeholder* lelang.
5. Penggalan Potensi Lelang.
6. Lelang serentak.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai indikator kinerja ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

1. Efisiensi atas penggunaan sumber daya terkait realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN Aset:

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Bimbingan Teknis/Sosialisasi/FGD di Bidang Barang Milik Negara (Implementasi SIMAN V2)	Rp149.940.000,00	Rp133.250.715,00	Telah dilakukan bimbingan teknis, sosialisasi, dan FGD kepada satuan kerja dan KPKNL di wilayah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.
2.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN (dalam rangka Implementasi SIMAN V2 pada satuan kerja secara langsung)	Rp19.232.000,00	Rp19.232.000,00	Monitoring Implementasi SIMAN V2 pada satuan kerja

*kegiatan ini memiliki kaitan dengan IKU yang lain

2. Efisiensi atas penggunaan sumber daya terkait realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN piutang negara:

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	Rp37.944.000,00	Rp30.407.000,00	Telah diselesaikan sebanyak 688 BKPN
2.	Bimbingan Teknis/sosialisasi/FGD Bidang Piutang Negara	Rp37.824.000,00	Rp36.364.825,00	Telah dilakukan bimbingan teknis, sosialisasi, dan FGD kepada petugas pengurus piutang di KPKNL

*kegiatan ini memiliki kaitan dengan IKU yang lain

3. Efisiensi atas penggunaan sumber daya terkait realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN lelang:

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Sosialisasi / Edukasi dibidang lelang	24,685,000	23,209,400	Kegiatan berupa: 1. Bimtek/Sosialisasi/FGD di Bidang Lelang Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang 2. Telah terselenggara 2kali kegiatan Sosialisasi dengan mengundang seluruh Pelelang lingkup Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara
2.	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta tindak lanjut atas Pelaksanaan Lelang	86,172,000	84,683,482	Kegiatan pemeriksaan Minuta dengan Output LHP, BAP dan KKP yang dilaksanakan tahun 2024, dengan rincian yaitu: 1. KPKNL Denpasar periode Minuta Semester 2 Tahun 2021 s.d Tahun

				2023 2. KPKNL Bima periode Minuta tahun 2022 dan 2023 3. KPKNL Mataram periode minuta tahun 2022 dan 2023 4. KPKNL Kupang periode minuta Semester 2 Tahun 2022 s.d Tahun 2023 5. KPKNL Singaraja periode pemeriksaan minuta Semester 2 Tahun 2021 s.d Tahun 2023
3	Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	100.000.000	99,339,248	Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang
4	Penggalian Potensi Lelang	100.000.000	86.059.384	Penggalian potensi lelang pada <i>stakeholder</i> (KPKNL, Balai Lelang dan PL 2), perbankan maupun UMKM
5	Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	13,408,000	6,680,000	Pemberian rekomendasi/perizinan Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II

*penggunaan anggaran ini juga berkaitan dengan indikator kinerja yang lain

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN aset diantaranya adalah pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kepada KPKNL dan satuan kerja terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan aset serta pelaksanaan implementasi SIMAN V2. Aplikasi ini digunakan melaksanakan pengelolaan BMN termasuk permohonan pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan BMN oleh satuan kerja dan pemberian rekomendasi persetujuan pengelolaan BMN oleh KPKNL.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN piutang negara diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kepada seksi Piutang Negara pada KPKNL.
2. Koordinasi dan sosialisasi dengan para penyerah piutang bersama-sama dengan KPKNL.
3. Sosialisasi PMK 30 Tahun 2024 terkait dengan *crash program* penyelesaian piutang negara melalui pemberian keringanan utang.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN lelang diantaranya adalah:

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi capaian secara berkala baik capaian PL I, PL II dan Pegadaian.
2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan secara triwulanan.

3. Sosialisasi aplikasi/peraturan/kebijakan lelang terkini terhadap *stakeholder* baik tatap muka maupun daring.
4. Pembinaan secara intensif.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN aset, terdapat risiko yaitu:

1. Adanya BMN yang telah dilakukan perjanjian Pemanfaatan BMN tetapi belum mendapat persetujuan pengelola barang dan hasil pemanfaatan tidak disetorkan ke kas negara (dipetakan pada level 13).
2. Tidak ditindaklanjutnya persetujuan pengelolaan BMN (dipetakan pada level 17).

Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko diantaranya:

1. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN.
2. Pembinaan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN bagi *stakeholder* yang dilaksanakan pada Juli 2024.

Dengan demikian diproyeksikan risiko akan menjadi rendah pada level 11 dan level 10.

Terhadap pencapaian realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN piutang negara, terdapat risiko yaitu banyaknya BKPN yang tidak dapat diselesaikan, yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 11. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko diantaranya dengan:

1. Koordinasi, Monev Berkala, Bimbingan Teknis, Pembinaan Langsung, atau melalui media komunikasi lainnya, dalam upaya mengidentifikasi kendala permasalahan, menyusun strategi serta tindak lanjut penyelesaian.
2. Meminta Prognosa kepada KPKNL dalam upaya memenuhi Target Realisasi Capaian Kinerja.
3. Melakukan pemantauan progres perkembangan.

Namun demikian, tingkat risiko tetap diproyeksikan pada level 11.

Terhadap pencapaian realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN lelang, terdapat risiko yaitu banyaknya lelang eksekusi hak tanggungan yang tidak ada penawaran, yang dipetakan pada awal tahun beradap pada level 19. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko diantaranya dengan pemantauan dan penggalan potensi lelang kepada pihak perbankan serta melakukan koordinasi atau pembinaan kepada *stakeholder* dan KPKNL untuk penggalan potensi lelang. Dengan demikian diproyeksikan risiko akan menjadi rendah pada level 11.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN aset, terdapat masalah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu potensi keterlambatan beberapa penyelesaian permohonan pemanfaatan dan pemindahtanganan pada KPKNL akibat implementasi SIMAN V2 yang belum optimal. Untuk mengatasi hal dimaksud, dilakukan langkah-langkah yaitu memberikan bantuan bimbingan teknis terkait implementasi SIMAN V2 kepada KPKNL dan satuan kerja di wilayah kerjanya dalam rangka penyelesaian permohonan pemanfaatan dan pemindahtanganan.

Dalam pencapaian realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN piutang negara, terdapat beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

1. Profil BKPN tanpa jaminan atau dengan jenis jaminan lain-lain dan ketidakmampuan debitur untuk menyelesaikannya.
2. Penyerahan pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh penyerah piutang namun debitur dan tempat usahanya berlokasi diluar wilayah kerja KPKNL.
3. Penyerahan piutang negara yang tidak didukung dengan dokumen dan lampiran dokumen pendukung yang memadai.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah – langkah, yaitu:

1. Pendekatan persuasif kepada debitur sehingga memperbesar potensi penyelesaian pengurusan.
2. Koordinasi dengan Penyerah Piutang dan KPKNL yang memiliki satu wilayah kerja yang sama dengan domisili penanggung utang.
3. Komunikasi kepada penyerah piutang dan melakukan penelitian penyerahan. Apabila tidak memenuhi unsur adanya dan unsur besarnya piutang negara maka dikomunikasikan secara informal dan formal untuk penolakan penyerahan piutang.

Dalam pencapaian realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN lelang, terdapat masalah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu masih tingginya lelang TAP. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah – langkah, yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan PL II baik melalui Telepon, WAG, Zoom, Teams Meeting dll.
2. Berkoordinasi dengan pemohon lelang dari Perbankan dalam rangka meningkatkan realisasi capaian PNBPN Lelang.

Rencana aksi ke depan

Guna terus meningkatkan capaian realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN aset, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Senantiasa melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada seksi Pengelolaan Kekayaan Negara pada KPKNL.
2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan para unit kuasa pengguna barang bersama-sama dengan KPKNL terhadap ketentuan terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan aset. Guna terus meningkatkan capaian realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN piutang negara, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan pendekatan persuasif sehingga memperbesar potensi pembayaran piutang oleh debitur.
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi persuasif dengan Penyerah Piutang dan KPKNL yang memiliki satu wilayah kerja yang sama dengan domisili penanggung utang sebelum dilakukan penyerahan kepada PUPN/KPKNL.

Guna terus meningkatkan capaian realisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN lelang, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan terus berkoordinasi dengan Pemohon Lelang (Perbankan) di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
2. Memberi usulan kepada perbankan/pemohon lelang agar menetapkan harga limit lelang dengan nilai likuidasi pada lelang ke-2 atau ke-3.

b. (1b-CP) Indeks Integritas

Indikator kinerja Indeks Integritas bertujuan untuk :

1. Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai atau responden internal dan pengguna layanan Kementerian Keuangan atau pengguna layanan eksternal.
2. Menjadikan *pilot project good government* pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil atau *result oriented government*.

Adapun *trajectory* indikator kinerja Indeks Integritas tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (1b-CP) Indeks Integritas							
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	10%	20%	20%	30%	30%	89,17%	89,17%	Max/TLK
Realisasi	10%	20%	20%	42%	42%	92,44%	92,44%	
Capaian	100%	100%	100%	140%	140%	103,67%	103,67%	
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	120%	120%	103,67%	103,67%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja

Unit Eselon I.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	89,17	92	92	92	-	92,44
2023	88,67	91,5	91,5	91,5	-	89,17
2022	-	91	91	91	-	-
2021	-	90,5	90,5	-	-	-
2020	-	90	90	87,65	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks integritas tahun 2024, telah dilakukan *extra effort* berupa pembentukan channel pada aplikasi Ms Teams. Channel Ms Teams ini bermanfaat sebagai sarana koordinasi dokumentasi kegiatan pembangunan integritas dan pelaksanaan tugas kepatuhan internal lainnya di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dan KPKNL yang ada dibawah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Membuat matriks plan hasil SPI 2023.
2. Sosialisasi Antikorupsi oleh Pimpinan Unit Kerja: Melaksanakan sosialisasi, baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal DJKN, dengan pimpinan unit kerja berperan sebagai narasumber utama dan dilaksanakan sesuai pedoman.
3. Publikasi Standar Pelayanan: Mempublikasikan informasi terkait standar pelayanan melalui berbagai media yang bias dijangkau pengguna layanan guna memberikan kejelasan informasi terkait layanan.
4. Publikasi Nilai-nilai Antikorupsi: Melakukan publikasi nilai-nilai antikorupsi pada berbagai media.
5. Pembinaan oleh Atasan Langsung: Mengoptimalkan peran atasan langsung dalam

pembinaan pegawainya secara memadai, baik melalui *know your employee*, *coaching* dan *mentoring*, *integrity sharing*, maupun memberikan keteladanan dalam mengimplementasikan pesan-pesan dalam sosialisasi (*walk the talk*).

6. Pelatihan Antikorupsi: Pejabat dan pegawai (diutamakan pejabat Eselon II s.d. IV) agar mengikuti pelatihan antikorupsi.
7. Publikasi Saluran Pengaduan: Menyebarkan saluran pengaduan yang tersedia di DJKN kepada *stakeholder* melalui berbagai media dan berbagai kesempatan.
8. Publikasi Aturan Disiplin dan Kode Etik serta Perlindungan Pelapor: Mengkomunikasikan upaya-upaya penegakan aturan terkait implementasi hukuman disiplin dan kode etik serta mekanisme perlindungan pelapor.
9. Pelaporan LHKPN/LHKASN: Memastikan seluruh pegawai melaporkan LHKPN/LHKASN tepat waktu, termasuk laporan awal menjabat untuk PNWL baru dan PNWL pengaktifan kembali.
10. Internalisasi Hasil SPI: Melakukan internalisasi terkait pembelajaran dan langkah-langkah perbaikan berdasarkan hasil SPI oleh seluruh unit kerja DJKN kepada seluruh pegawainya.
11. Pemantauan Pengendalian Utama: Melaksanakan pemantauan pengendalian utama atas proses bisnis utama DJKN.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam melaksanakan kinerja pada tahun 2024, baik IKU Kemenkeu-Two, IKU *Mandatory* maupun IKU lainnya, Seksi Kepatuhan Internal memperoleh sumber daya berupa anggaran untuk Implementasi Pengendalian dan Kepatuhan Internal sebesar Rp40.292.000,00 yang terdiri atas kegiatan Implementasi Pengendalian dan Kepatuhan Internal sejumlah Rp22.848.000,00, kegiatan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional sejumlah Rp4.436.000,00, dan kegiatan Implementasi Manajemen Resiko sejumlah Rp13.008.000,00. Untuk realisasi anggaran mencapai 79,16% atau sebesar Rp31.893.963,00 dari total pagu pada tahun 2024. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan terdapat efisiensi sumber daya finansial sebesar 20,84% atau sejumlah Rp8.398.037,00 dari total pagu dan telah mencapai target yang ditetapkan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja indeks integritas diantaranya adalah melibatkan masyarakat/*stakeholder* untuk berkontribusi dalam menjaga integritas pegawai Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, diantaranya dengan:

1. Penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas dengan Pemerintah Kota Denpasar.

2. Pembuatan surat himbauan kepada *stakeholder* untuk tidak memberikan gratifikasi kepada pegawai Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.
3. Sosialisasi saluran pengaduan kepada masyarakat/*stakeholder*, baik melalui kegiatan tatap muka, *website*, medsos, serta APT.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum, yang dipetakan pada level 21. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko diantaranya:

1. Pelaksanaan pelaporan gratifikasi secara berkala pada setiap bulan.
2. Melakukan pengawasan dan pemantauan pegawai secara berkala melalui pemantauan kode etik dan perilaku secara berkala sesuai setiap bulan dan pelaporan dilaksanakan pada setiap semester.
3. Pelaksanaan profiling bagi seluruh pegawai.
4. Internalisasi penguatan budaya integritas kepada seluruh pegawai (*integrity sharing*).
5. Desiminasi tolak dan lapor gratifikasi (melalui *website*/medsos/instagram Kanwil dan APT).

Karena integritas merupakan nilai dasar yang perlu dimiliki oleh setiap jajaran Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara serta agar seluruh jajaran senantiasa menjaga integritas dan anti korupsi, matriks manajemen risiko tetap memetakan risiko ini pada level 21.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2024, masalah yang perlu mendapatkan perhatian adalah adanya kejadian fraud yang tidak dapat diprediksi terjadi di tahun penilaian/tahun survei, yang berakibat pada pengurangan nilai/indeks integritas. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah – langkah, yaitu optimalisasi UKI selaku lini pertahanan kedua untuk senantiasa melakukan penguatan integritas dan budaya anti korupsi, diantaranya melalui:

- a. *Integrity sharing* dengan narasumber Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.
- b. Sosialisasi nilai – nilai integritas, anti korupsi, serta tolak dan lapor gratifikasi kepada pihak internal maupun eksternal melalui *website*, media sosial, *running text*, banner, TV APT, dan dalam kegiatan tatap muka, baik oleh pimpinan unit maupun oleh penyuluh anti korupsi pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.
- c. Pembinaan kepatuhan internal dan manajemen risiko kepada KPKNL.

Rencana aksi ke depan

Guna menjaga indeks integritas tetap tinggi, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Senantiasa melakukan aksi kolaboratif dalam melaksanakan serangkaian rencana aksi atas hasil SPI tahun 2024 serta program penguatan integritas sepanjang tahun 2025.
2. Mempertahankan kolaborasi/sinergi dalam rangka penguatan integritas yang telah dilakukan oleh seluruh lini pada tahun 2024.

2. Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan berbagai upaya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya bahwa pengelolaan kekayaan negara dilakukan dengan baik, sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna jasa, serta memenuhi standar kualitas layanan kekayaan negara yang tinggi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mengidentifikasi 3 indikator kinerja yaitu:

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
SS: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa				117,59%
2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	146,91%	120%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	138,60%	120%
2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%	112,77%	112,77%

Uraian mengenai indikator kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. (2a-N) Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Indikator kinerja ini terdiri dari 2 komponen yaitu:

1. Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). SBSK BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.
2. Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Adapun *trajectory* indikator kinerja tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 2: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	(2a-N) Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	159,34%	147,28%	147,28%	172,83%	172,83%	130,76%	130,76%	
Capaian	159,34%	147,28%	147,28%	172,83%	172,83%	130,76%	130,76%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%	-	-	-	-	130,76%
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara tahun 2024, telah dilakukan *extra effort* berupa pendampingan dan monitoring pengisian formulir pengukuran standar biaya dan standar kebutuhan serta koordinasi dengan satuan kerja dan mitra pemanfaatan terkait tindak lanjut pemanfaatan BMN.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena tindakan yang telah dilaksanakan yaitu percepatan pelaksanaan survei standar barang dan standar kebutuhan yang dilaksanakan sejak awal tahun.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan dalam pencapaian indikator kinerja tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara. Pelaksanaan kegiatan - kegiatan ini diintegrasikan dengan kegiatan Bidang PKN yang lainnya, sehingga secara umum terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara diantaranya adalah:

1. Data pada aplikasi SIMAN BMN sudah divalidasi sehingga mempermudah pengukuran.
2. Terhadap aset yang tidak ditemukan sudah dilakukan penghapusan.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu:

1. risiko data capaian tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK tidak akurat, yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 10;
2. risiko rekomendasi optimalisasi tidak ditindaklanjuti oleh Satker, yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 10; dan
3. risiko satuan kerja tidak menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 7.

Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko diantaranya dengan melakukan sosialisasi kepada Satker. Dengan demikian diproyeksikan ketiga risiko tersebut akan menjadi rendah pada level 5.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat masalah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu ketidaksesuaian antara penggunaan riil dengan jenis BMN yang tercatat. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan langkah – langkah, yaitu melakukan perubahan kodefikasi BMN untuk menyesuaikan penggunaan riil dengan pencatatan aset.

Rencana aksi ke depan

Guna mendorong tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara tetap tinggi, rencana aksi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan survei standar barang dan standar kebutuhan yang dilaksanakan sejak awal tahun.

b. (2b-CP) Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang (pokok lelang) diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang

yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I/JF Pelelang dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang ini memperhitungkan (Jumlah Realisasi Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PL II) / (Target Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PLII). IKU ini bertujuan agar Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Adapun *trajectory* indikator kinerja persentase realisasi pokok lelang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 2: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	(2b-CP) Persentase realisasi pokok lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	164,62%	168,08%	168,08	117%	117%	138,60%	138,60%	
Capaian	164,62%	168,08%	168,08	117%	117%	138,60%	138,60%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	117%	117%	120%	120%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Rincian realisasi pokok lelang adalah sebagai berikut:

Unit	Target	Realisasi
KPKNL Denpasar	692.000.000.000	1.050.163.327.935
KPKNL Singaraja	115.000.000.000	132.012.131.588
KPKNL Mataram	94.000.000.000	117.303.578.948
KPKNL Bima	93.000.000.000	120.541.836.058
KPKNL Kupang	369.000.000.000	406.799.744.585
Pejabat Lelang Kelas II	20.822.000.000	91.093.241.451
Kanwil Balinusra	1.383.822.000.000	1.917.913.860.565

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%	-	100%	-	-	138,60%
2023	100%	-	100%	100%*	-	108,66%
2022	100%	-	100%	100%*	-	107,18%
2021	100%	-	100%	100%*	-	162,34%
2020	100%	-	100%	100%*	-	73,64%

*Sumber: LAKIN DJKN 2023

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pokok lelang tahun 2024, telah dilakukan *extra effort* berupa :

1. Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan PL II baik melalui Telepon, WAG, Zoom, Teams Meeting dll.
2. Berkoordinasi dengan pemohon lelang dari Perbankan dalam rangka meningkatkan realisasi capaian pokok lelang.
3. Melaksanakan penggalan potensi lelang terhadap Perbankan.
4. Mengadakan lelang expo.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang continues improvement.
2. Pelaksanaan rangkaian lelang expo dalam rangka peringatan hari lelang.
3. Bersama dengan direktorat lelang dan KPKNL melakukan sosialisasi aplikasi lelang.go.id V2.
4. Mou dan koordinasi intensif dengan *Stakeholder* lelang.
5. Penggalan Potensi Lelang.
6. Lelang serentak.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai indikator kinerja ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Sosialisasi / Edukasi dibidang lelang	24,685,000	23,209,400	Kegiatan berupa: 1. Bimtek/Sosialisasi/FGD di Bidang Lelang Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang 2. Telah terselenggara 2kali kegiatan Sosialisasi dengan mengundang seluruh Pelelang lingkup Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara
2.	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta tindak lanjut atas Pelaksanaan Lelang	86,172,000	84,683,482	Kegiatan pemeriksaan Minuta dengan Output LHP, BAP dan KKP yang dilaksanakan tahun 2024, dengan rincian yaitu: 1. KPKNL Denpasar periode Minuta Semester 2 Tahun 2021 s.d Tahun 2023 2. KPKNL Bima periode Minuta tahun 2022 dan 2023 3. KPKNL Mataram periode minuta tahun 2022 dan 2023 4. KPKNL Kupang periode minuta Semester 2 Tahun 2022 s.d Tahun 2023 5. KPKNL Singaraja periode pemeriksaan minuta Semester 2 Tahun 2021 s.d Tahun 2023
3	Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	100.000.000	99,339,248	Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang
4	Penggalian Potensi Lelang	100.000.000	86.059.384	Penggalian potensi lelang pada <i>stakeholder</i> (KPKNL, Balai Lelang dan PL 2), perbankan maupun UMKM
5	Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	13,408,000	6,680,000	Pemberian rekomendasi/perizinan Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II

*penggunaan anggaran ini juga berkaitan dengan indikator kinerja yang lain

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan realisasi pokok lelang diantaranya adalah:

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi capaian secara berkala baik capaian PL I, PL II dan Pegadaian.
2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan secara triwulanan.
3. Sosialisasi aplikasi/peraturan/kebijakan lelang terkini terhadap *stakeholder* baik tatap muka maupun daring.
4. Pembinaan secara intensif.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu adanya pembatalan lelang, yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 13. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko diantaranya dengan melakukan pembinaan ke KPKNL agar meningkatkan realisasi capaian pokok lelang, koordinasi dengan perbankan, dan penggalian potensi ke UMKM. Dengan demikian diproyeksikan ketiga risiko tersebut akan menjadi rendah pada level 11.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, masalah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu adanya pembatalan lelang. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah – langkah, yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan PL II baik melalui Telepon, WAG, Zoom, Teams Meeting dan lain sebagainya.
2. Berkoordinasi dengan pemohon lelang dari Perbankan dalam rangka meningkatkan realisasi capaian Pokok Lelang.

Rencana aksi ke depan

Guna terus meningkatkan realisasi pokok lelang, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan KPKNL maupun Pemohon Lelang khususnya (Perbankan) di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
2. Edukasi terhadap *stakeholder* agar senantiasa melengkapi dokumen persyaratan lelang.

c. (2c-CP) Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara terhadap BKPN lama. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan;
6. Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai).

Adapun *trajectory* indikator kinerja persentase penurunan outstanding piutang negara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 2: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa (2c-CP) Persentase penurunan outstanding piutang negara								
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	133,73%	187,80%	187,80%	156,18%	156,18%	106,85%	112,77%		
Capaian	133,73%	187,80%	187,80%	156,18%	156,18%	106,85%	112,77%		
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	106,85%	112,77%		

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Rincian realisasi penurunan outstanding piutang negara adalah sebagai berikut:

Unit	Target	Realisasi	Persen
KPKNL Denpasar	16.887.100.000	17.572.625.553	104,06
KPKNL Singaraja	4.690.500.000	4.711.174.607	100,44
KPKNL Mataram	148.000.000	1.265.860.092	855,31
KPKNL Bima	1.094.600.000	1.606.657.667	146,78
KPKNL Kupang	465.000.000	1.103.253.488	237,26
Kanwil Balinusra	23.285.200.000	26.259.571.407	112,77

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%	-	-	-	-	112,77%
2023	100%	-	-	100%*	-	150,27%
2022	100%	-	-	-	-	149,29%
2021	100%	-	-	-	-	112,41%
2020	3%	-	-	3%*	-	162,73%

*Sumber: LAKIN DJKN 2023

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Secara umum target penurunan outstanding Piutang Negara adalah 100% kecuali pada tahun 2020 sebesar 3% yang dihitung dari persentase piutang yang telah diselesaikan dibandingkan dengan outstanding piutang. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja, telah dilakukan *extra effort* berupa pendampingan/asistensi kegiatan pengurusan piutang negara melalui pengurusan sederhana

kepada KPKNL dalam kegiatan penagihan kepada debitur di lapangan serta koordinasi dengan penyerah piutang membahas solusi penyelesaian piutang yang diurus PUPN.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Percepatan penyelesaian berkas kasus piutang negara untuk melakukan angsuran/pelunasan.
2. Terhadap penanggung yang tidak ada kemampuan untuk membayar atau tidak diketahui keberadaannya segera diarahkan untuk dilakukan PSBDT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai indikator kinerja ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	Rp37.944.000,00	Rp30.407.000,00	Telah disusun/ dihasilkan penyelesaian sebanyak 688 BKPN
2.	Bimbingan Teknis/sosialisasi/FGD Bidang Piutang Negara	Rp37.824.000,00	Rp36.364.825,00	Telah dilakukan bimbingan teknis, sosialisasi, dan FGD kepada petugas pengurus piutang di KPKNL

*kegiatan ini memiliki kaitan dengan IKU yang lain

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

1. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kepada seksi Piutang Negara pada KPKNL.
2. Koordinasi dan sosialisasi dengan para penyerah piutang bersama-sama dengan KPKNL.
3. Sosialisasi PMK 30 Tahun 2024 terkait dengan *crash program* penyelesaian piutang negara melalui pemberian keringanan utang.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu tahapan pengurusan piutang negara tidak dapat terlaksana secara optimal, yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 10. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko diantaranya dengan:

1. Koordinasi, Monev Berkala, Bimbingan Teknis, Pembinaan Langsung, atau melalui media komunikasi lainnya, dalam upaya mengidentifikasi kendala permasalahan, menyusun strategi serta memberikan solusi penyelesaiannya.
2. Meminta Prognosa kepada KPKNL dalam upaya memenuhi Target Realisasi Capaian Kinerja.
3. Melakukan pemantauan progres perkembangan upaya KPKNL, dan memastikan realisasi yang dicapai minimal sesuai Target dalam setiap tahapan Triwulannya.

Dengan demikian diproyeksikan risiko tersebut akan menjadi rendah pada level 7.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

1. Profil BKPN tanpa jaminan atau dengan jenis jaminan lain-lain dan ketidakmampuan debitur untuk menyelesaikannya.
2. Penyerahan piutang negara yang dilakukan oleh penyerah piutang namun debitur dan tempat usahanya berlokasi diluar wilayah kerja KPKNL.
3. Penyerahan piutang negara yang tidak didukung dengan dokumen dan lampiran dokumen pendukung yang memadai.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah – langkah, yaitu:

4. Pendekatan persuasif kepada debitur sehingga memperbesar potensi penyelesaian piutang.
5. Koordinasi dengan Penyerah Piutang dan KPKNL yang memiliki satu wilayah kerja yang sama dengan domisili penanggung utang.
6. Komunikasi kepada penyerah piutang dan melakukan penelitian penyerahan. Apabila tidak memenuhi unsur adanya dan unsur besarnya piutang negara maka dikomunikasikan secara informal dan formal untuk penolakan penyerahan piutang.

Rencana aksi ke depan

Rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan pendekatan persuasif sehingga memperbesar potensi penyelesaian piutang.
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi persuasif dengan Penyerah Piutang dan KPKNL yang memiliki satu wilayah kerja yang sama dengan domisili penanggung utang sebelum dilakukan penyerahan kepada PUPN/KPKNL.

3. Sasaran Strategis: Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien ditandai dengan simplifikasi birokrasi, fokus pada kecepatan dan kemudahan layanan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada customer atas pelayanan penilaian. Customer diharapkan dapat memantau dan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi layanan berdasarkan proses yang sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya akselerasi perubahan melalui transformasi organisasi pada ketepatan waktu dalam proses bisnis layanan di bidang Penilaian.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mengidentifikasi 1 indikator kinerja yaitu:

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
SS: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa				120%
3a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	106,76	120%

Uraian mengenai indikator kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. (3a-N) Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi. Dikecualikan dari perhitungan Manual IKU ini, dalam hal penilaian

memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain berada.

Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

1. Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon.
2. Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.
3. Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD).
4. Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:
 - a. Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
 - b. Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/ menghalangi;
 - c. Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;
 - d. Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (*force majeure*); dan/atau
 - e. objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan, sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL).
5. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian.

Norma waktu tersebut mulai berjalan kembali saat surat/nota dinas diterima oleh Kepala Kantor untuk memulai kembali proses penyelesaian permohonan penilaian.

Penilaian secara tepat waktu adalah:

- a. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN.
- b. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN.
- c. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 33 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN.
- d. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.
- e. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 48 hari kerja untuk penilaian bisnis.
- f. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 50 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam

(jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N).

Terhadap permohonan penilaian yang bersifat massal dan memerlukan koordinasi dengan beberapa unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, tidak memperhitungkan lama Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dalam penentuan Penilaian secara tepat waktunya, sehingga perlu dirumuskan lama waktu maksimal terhadap permohonan tersebut menjadi:

- a. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN.
- b. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 34 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN.
- c. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 23 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN.
- d. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.
- e. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 38 hari kerja untuk penilaian bisnis.
- f. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 40 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam.
(jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N)

Analisis lain di bidang penilaian secara tepat waktu adalah analisis yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk analisis di bidang penilaian, antara lain, analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik, analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial, dan sebagainya.

Jumlah hari tersebut berlaku:

- a. Untuk objek penilaian yang dimohonkan sampai dengan 5 objek, dalam kelipatan 5 objek selanjutnya akan menambah 2 hari kerja.
- b. Untuk Peralatan dan mesin yang memiliki bukti kepemilikan dan kendaraan bermotor dalam kelipatan 10 objek akan menambah 2 hari kerja.
- c. Untuk Peralatan dan mesin yang tidak memiliki bukti kepemilikan dan selain kendaraan bermotor dalam kelipatan 50 objek akan menambah 2 hari kerja.

Contoh perhitungan batas norma waktu yang harus dipenuhi untuk tiap permohonan penilaian adalah sebagai berikut: permohonan penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN/BMD dengan jumlah objek 20 maka penyelesaian penilaian paling lama 23 (17 + 2*3) hari.

Capaian IKU ini dihitung mulai tanggal SOP pelayanan penilaian mulai berlaku, dengan jangka waktu penyelesaian diatas mengacu pada Kepdirjen nomor 57/KN/2023, 58/KN/2023,

59/KN/2023, 69/KN/2023. Adapun formula realisasi IKU dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Penilaian pada Kanwil DJKN dihitung dari rata-rata indeks per laporan penilaian di wilayah kerjanya. Sedangkan untuk penentuan besarnya indeks tiap laporan penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Batas waktu penyelesaian	Indeks
1 hari s.d. 30% N	120
N - 60% N	100
N - 45% N	95
N - 30% N	90
N - 15% N	85
<N	80
N	75
N + 15% N	70
N + 30% N	60
N + 45% N	50
N + (>45% N)	40

N = Jumlah Hari Maksimal Pelaksanaan Penilaian

Perhitungan capaian Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian terhitung mulai tanggal surat/nota dinas masuk permohonan penilaian sampai dengan terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Terhadap Permohonan Penilaian yang dimintakan bantuan ke Unit lain, perhitungan norma waktu tetap dihitung dari tanggal permohonan penilaian diterima oleh Kantor termohon pertama kali. dan Capaian IKU diklaim oleh Kantor penerima permintaan bantuan penilaian. apabila Verifikasi di kantor termohon penilaian pertama kali melebihi 2 hari kerja maka penerima permintaan bantuan tidak perlu mengakui capaian IKU nya.

Adapun *trajectory* indikator kinerja indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 3: Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien (3a-N) Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian								
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	75	Max/ Avg
Realisasi	100,7	102,45	102,45	101,37	101,37	106,76	106,76		
Capaian	134,26%	136,6%	136,6%	135,16%	135,16%	142,34%	142,34%		
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	75	-	-	-	-	102,73

2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian tahun 2024, telah dilakukan *extra effort* sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan kepada para PFPP di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara melalui kegiatan sosialisasi dan *Forum Group Discussion* (FGD) baik terkait Manual IKU, pemenuhan realisasi, ketentuan Standar Operasi Prosedur (SOP), dan strategi pencapaiannya.
2. Meminta kepada para PFPP di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara agar senantiasa melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan penilaian berikut SOP yang berlaku.
3. Melakukan pemantauan atau monitoring secara berkala pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) dan realisasi IKU pada tautan <https://bit.ly/capkinbalinusra2024>.
4. Meminta agar para PFPP pada KPKNL untuk mengajukan perbantuan penilaian kepada Kantor Wilayah DJKN untuk selanjutnya nanti Kanwil DJKN yang akan mengevaluasi dan menganalisis tindak lanjut permohonan penilaian dengan mempertimbangkan ketersediaan Penilai di KPKNL lain dan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dalam hal terdapat overload permohonan penilaian sedangkan ketersediaan SDM tidak mencukupi.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian ditetapkan dengan target kinerja utama sebesar 75% setiap triwulan untuk rata-rata indeks penyelesaian layanan. Sebelumnya, target ini diatur secara semesteran dan tahunan, tetapi untuk meningkatkan detail dan akurasi pemantauan kinerja, target diperketat menjadi triwulan. Target yang ditetapkan oleh Kantor Pusat harus dipenuhi oleh setiap unit kerja tanpa pengecualian. Pemenuhan target triwulan berdampak signifikan terhadap penyusunan target berikutnya, memaksa setiap unit untuk berupaya mencapai target yang ditetapkan dan menutupi kekurangan triwulan sebelumnya.

Tebal Realisasi IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

No	Unit	Raw Data Tahun 2023	Raw Data target s.d. Q1 (75)	Raw Data target s.d. Q2 (75)	Raw Data target s.d. Q3 (75)	Raw Data target s.d. Q4 (75)	Realisasi s.d. Q1 2024		Realisasi s.d. Q2 2024		Realisasi s.d. Q3 2024		Realisasi s.d. Q4 2024 DESEMBER	
							Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penilaian	Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penilaian	Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penilaian	Nilai Indeks	Jumlah Laporan Penilaian
1	Kanwil Balinusra	75	75	75	75	75	100,7	93,00	102,45	183,00	100,97	289,00	102,92	465,00
2	Lingkup Kanwil	75	75	75	75	75	100,00	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00
3	KPKNL Denpasar	75	75	75	75	75	87,24	30,00	90,88	70,00	89,59	92,00	92,55	116,00
4	KPKNL Singaraja	75	75	75	75	75	110,71	23,00	111,9	35,00	105,32	85,00	105,35	183,00
5	KPKNL Mataram	75	75	75	75	75	110,00	10,00	112,68	33,00	109,72	64,00	108,79	117,00
5	KPKNL Bima	75	75	75	75	75	120,00	5,00	115,63	17,00	110,53	20,00	114,12	20,00
6	KPKNL Kupang	75	75	75	75	75	101,43	22,00	103,53	25,00	103,53	25,00	103,53	26,00

Secara keseluruhan dalam 1 (satu) periode tahun 2024, tampak dalam tabel di atas bahwa realisasi capaian Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara beserta seluruh KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara untuk IKU dimaksud mampu berada di atas target. Namun demikian pada periode triwulan sebelumnya, terlihat KPKNL Denpasar cukup kesulitan untuk memenuhi realisasi di target yang ditetapkan. Oleh karena ini Kanwil DJKN Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara langsung melakukan upaya koordinasi kepada para PFPP KPKNL yang bersangkutan untuk mengetahui permasalahan yang ada.

Dari beberapa permasalahan yang ada terungkap pokok kendala yang mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian pada KPKNL Denpasar yaitu keterbatasan SDM Penilai yang ada, mengingat adanya mutasi keluar PFPP yang belum diimbangi dengan mutasi masuk dan terdapat 1 (satu) PFPP Pertama yang tengah menjalani Tugas Belajar. Hal ini tentunya menjadi perhatian dari Bidang Penilaian Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang segera meminta agar KPKNL bersangkutan untuk mengajukan perbantuan penilaian kepada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara agar permohonan penilaian yang diajukan dapat ditindaklanjuti pada kesempatan pertama.

Dengan upaya monitoring atas realisasi capaian IKU dan koordinasi aktif antara Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dengan para PFPP di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, maka capaian IKU IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian dapat terpenuhi dengan baik, yang tentunya berpengaruh pula pada capaian organisasi Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam pelaksanaan kinerja tahun 2024 dan pemenuhan IKU baik IKU Kemenkeu-Two, IKU *Mandatory* maupun IKU lainnya, Bidang Penilaian memperoleh sumber daya anggaran sebesar Rp107.644.000 yang terdiri atas kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi/FGD sebesar Rp16.512.000, kegiatan Survei Lapangan dan Penilaian sebesar Rp19.664.000, kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah Rp12.928.000, kegiatan survei dan penyusunan DKPB tahun 2025 sebesar Rp36.204.0000, dan kegiatan Survei Basis

Data sebesar Rp22.336.000. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 100.653.788 atau sebesar 93,66% dari pagu. Dengan demikian menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Sedangkan untuk sumber daya manusia, secara struktural Bidang Penilaian didukung oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kepala Seksi, dan 2 (dua) orang Pelaksana. Namun demikian secara pelaksanaan tugas operasional, Bidang Penilaian dibantu pula oleh 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Madya dan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Perhitungan IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian dimulai dengan kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian sampai dengan terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pihak pemohon. Tentunya akan beresiko bagi organisasi DJKN apabila penyelesaian layanan penilaian dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan mengingat dapat menyebabkan timbulnya risiko kinerja maupun risiko citra organisasi di mata masyarakat.

Hal ini tentunya menjadi perhatian pula bagi Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara agar seluruh layanan penilaian dapat diselesaikan tepat waktu bahkan disampaikan kepada Pemohon sebelum tenggat waktu penyelesaian. Selain melakukan pembinaan secara berkala kepada seluruh PFPP di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, Bidang Penilaian melakukan pemantauan atau monitoring secara berkala pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) dan realisasi IKU pada tautan monev capaian kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam hal ketersediaan SDM Penilai Pemerintah tidak mencukupi, Bidang Penilaian senantiasa berkoordinasi aktif untuk meminta agar para PFPP pada KPKNL untuk segera mengajukan perbantuan penilaian kepada Kantor Wilayah DJKN untuk selanjutnya nanti Kanwil DJKN yang akan mengevaluasi dan menganalisis tindak lanjut permohonan penilaian dengan mempertimbangkan ketersediaan Penilai di KPKNL lain dan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Dalam upaya untuk memenuhi pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional, para PFPP dituntut untuk selalu meng-*update* kompetensi baik teknis maupun sosial kultural. Ketika menemui kendala dan hambatan di lapangan yang dapat mempengaruhi penyelesaian layanan penilaian, para PFPP diminta harus berkoordinasi satu sama lain dan menyampaikan segera kepada Bidang Penilaian Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, yang tiada henti pembinaan formal kepada para PFPP di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara melalui kegiatan

sosialisasi dan *Forum Group Discussion* (FGD) baik terkait Manual IKU, pemenuhan realisasi, ketentuan Standar Operasi Prosedur (SOP), dan strategi pencapaiannya maupun non formal melalui diskusi di ruang kantor.

Pemantauan atau monitoring secara berkala juga terus dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) dan realisasi IKU pada tautan monev capaian kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada <https://bit.ly/capkinbalinusra2024> sehingga ketika terdapat layanan yang tersendat dapat segera diketahui dan dicarikan berbagai opsi penyelesaiannya, termasuk ketika ketersediaan SDM tidak mencukupi, para PFPP pada KPKNL harus segera mengajukan perbantuan penilaian kepada Kantor Wilayah DJKN untuk selanjutnya nanti Kanwil DJKN yang akan mengevaluasi dan menganalisis tindak lanjut permohonan penilaian dengan mempertimbangkan ketersediaan Penilai di KPKNL lain dan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

1. Beban kerja antar KPKNL tidak sama yang tidak diiringi dengan dukungan anggaran yang memadai sehingga pelaksanaan penilaian harus dilakukan seefisien mungkin
2. Permohonan penilaian seringkali overload.
3. Waktu penyelesaian laporan penilaian yang melebihi SOP.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah – langkah, yaitu:

1. Berkoordinasi aktif dengan KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Bidang Penilaian sering menghadapi permasalahan terkait SDM, terutama ketika seluruh SDM Penilai tengah melaksanakan penilaian di lapangan. Apabila terdapat permohonan penilaian mendadak, sulit menentukan siapa yang akan menangani. Pentingnya koordinasi dengan KPKNL ataupun Kantor Pusat untuk mengatasi kendala ini.
2. Meminta KPKNL agar menyampaikan perbantuan penilaian kepada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara

Dibutuhkan sistem seperti *time chart* atau *time schedule* untuk memantau status permohonan dan pengaturan SDM. Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dapat saling bahu membahu dengan seluruh KPKNL di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara mempertimbangkan kedekatan wilayah dan factor efektivitas dan efisiensi guna memastikan tinak lanjut penilaian tetap berjalan lancar walaupun terdapat tantangan dalam pengaturan SDM Penilai.

Rencana aksi ke depan

Setiap organisasi dengan kepemilikan aset berupaya mengelola aset tersebut secara optimal untuk memastikan kelangsungan operasionalnya. Aset dapat didefinisikan sebagai barang atau objek yang dimiliki dan mempunyai nilai ekonomis, komersial, atau nilai pertukaran, yang dapat dimiliki atau digunakan oleh lembaga, organisasi, atau individu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, BMN adalah aset yang diperoleh melalui dana APBN atau sumber lain yang legal. Aset-aset ini meliputi tanah, gedung, jalan, kendaraan, dan alat kesehatan, yang harus dikelola secara efektif demi kepentingan publik.

Pengelolaan aset negara merupakan tanggung jawab Kementerian Keuangan Republik Indonesia, melalui Direktorat Kekayaan Negara (DJKN) yang berperan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terkait kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara, sebagai instansi vertikal, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam konteks pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Bidang Penilaian sebenarnya telah menerapkan pengendalian internal melalui pendekatan Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Enterprise Risk Management (COSO ERM) yang merupakan kerangka kerja manajemen risiko korporasi yang diterbitkan oleh COSO, dengan selalu menerapkan dan menandatangani Piagam Pakta Integritas dalam pelayanan penilaian kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan melakukan upaya pengendalian kualitas laporan penilaian yang dihasilkan oleh para Penilai Pemerintah.

Dengan pemantauan pengendalian waktu penyelesaian layanan penilaian melalui Sistem Informasi Penilaian (SIP) membantu organisasi mengelola risiko secara efektif, terintegrasi, dan terstruktur. Selain itu Bidang Penilaian terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar unit melalui koordinasi intensif, pelatihan rutin dan diskusi (*Forum Group Discussion*) berkala yang fokus pada standar operasional, pencapaian target, dan pemahaman risiko. Dalam penetapan target kinerja Bidang Penilaian disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan setiap tahunnya. IKU tersebut berfungsi sebagai tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur efektivitas serta efisiensi dalam penilaian.

4. Sasaran Strategis: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,
- pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,
- pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND
- pengurusan
- piutang negara;
- pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*)
- Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNB (revenue generating).
- Tingginya *turn over* penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mengidentifikasi 2 indikator kinerja yaitu:

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
SS: Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif				114,18%
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	108,36%	108,36%
4b-N	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	127,60%	127,60%

Uraian mengenai indikator kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. (4a-CP) Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, ketentuan ini ditegaskan kembali pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020. Sebagai tindak lanjut peraturan dimaksud maka juga diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Pensertipikatan BMN berupa tanah pada tahun 2024 dikelompokkan menjadi:

Kelompok	Deskripsi	Output
Kelompok 1 (K1)	<i>Clean & clear</i>	Sertipikat hak atas tanah
Kelompok 2 (K2)	<i>Not clean but clear</i>	Peta Bidang Tanah (PBT)
Kelompok 3 (K3)	<i>Clean but not clear / not clean & not clear</i>	Peta Tematik/ Produk Lainnya/ BA Pemeriksaan Fisik dan/atau data Yuridis
Kelompok 4 (K4)	-	<i>Updating data</i> pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Valserah

Total target bidang tanah yang disertipikatkan untuk tahun 2024 pada wilayah kerja Bali dan Nusa Tenggara adalah 1.460 bidang tanah dengan 1.439 NUP. Rincian target bidang dan NUP per wilayah kerja KPKNL per kelompok adalah sebagai berikut:

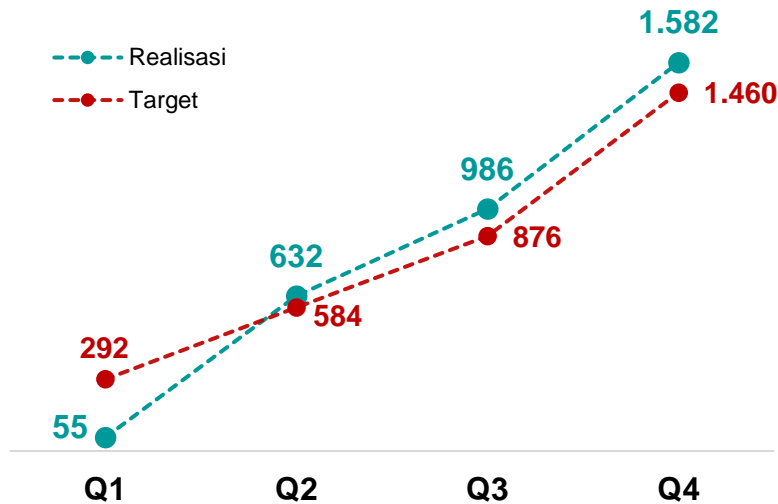
Target 2024										
KPKNL	K1		K2		K3		K4		Total	
	NUP	Bidang	NUP	Bidang	NUP	Bidang	NUP	Bidang	NUP	Bidang
Denpasar	1	1	34	34	232	242	235	243	502	520
Singaraja	-	-	5	5	250	253	-	-	255	258
Mataram	19	19	1	1	15	15	3	3	38	38
Bima	6	6	6	6	195	195	-	-	207	207
Kupang	1	1	-	-	429	429	7	7	437	437
Total	27	27	46	46	1.121	1.134	245	253	1.439	1.460

Sampai dengan 31 Desember 2024, sebanyak 1.582 bidang dengan 1.317 NUP telah disertipikatkan. Rincian realisasi capaian bidang dan NUP per wilayah kerja KPKNL per kelompok adalah sebagai berikut:

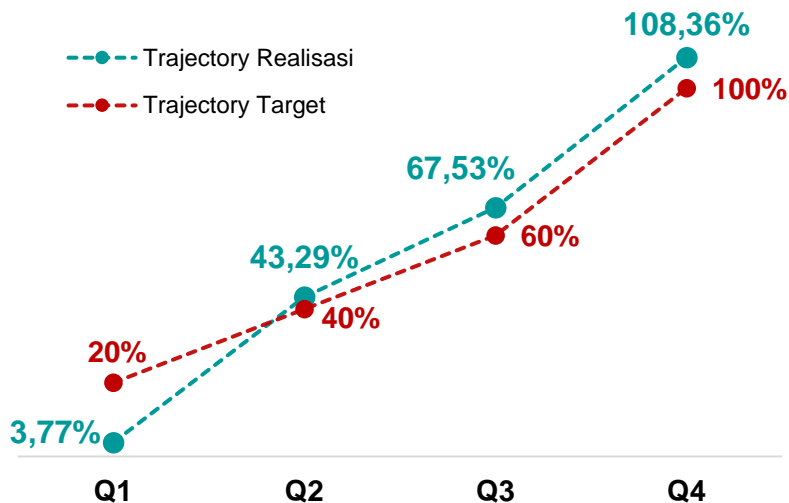
Realisasi 2024										
KPKNL	K1		K2		K3		K4		Total	
	NUP	Bidang	NUP	Bidang	NUP	Bidang	NUP	Bidang	NUP	Bidang
Denpasar	2	2	17	17	232	244	132	305	383	568
Singaraja	2	2	-	-	249	253	3	3	254	268
Mataram	31	31	-	-	15	15	3	3	49	49
Bima	10	11	6	6	195	195	-	-	211	212
Kupang	24	60	-	-	390	429	6	6	420	495
Total	69	106	23	23	1.081	1.136	144	317	1.317	1.582

Realisasi sebanyak 1.582 bidang adalah sebesar 108,36% dari jumlah yang ditargetkan sebesar 1.460 bidang. Realisasi tersebut dicapai melalui *trajectory* sebagai berikut:

Trajectory (satuan: bidang)



Trajectory (satuan: persentase)



Trajectory (penyajian tabular)

Kanwil DJKN Balinusra	SS 4: Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif (4a-CP) Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan								
	T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target		20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi		20%	43%	43%	67,53%	67,53%	108,36%	108,36%	
Capaian		100%	108,22%	108,22%	112,54%	112,56%	108,36%	108,36%	
Nilai Kinerja		100%	108,22%	108,22%	112,54%	112,56%	108,36%	108,36%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Pada tahun 2024, target pensertipikatan BMN tidak masuk dalam perencanaan kerja tahunan Kemenkeu sebagaimana tahun 2023. Target kinerja sertifikasi termuat dalam perjanjian/kontrak kinerja dan perencanaan strategis (jangka menengah 5 tahunan) DJKN. Realisasi kinerja pensertipikatan BMN selalu mencatatkan kinerja di atas 100%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%	-	100%	-	-	108,36%
2023	100%	-	100%	100%	-	109,95%
2022	100%	-	100%	100%	-	104,60%
2021	100%	-	100%	-	-	103,30%
2020	100%	-	100%	-	-	100,19%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Pelaksanaan program pensertipikatan BMN berupa tanah di wilayah Bali dan Nusa Tenggara tahun 2024 ini memiliki tantangan tersendiri mengingat objek sertifikasi merupakan bidang-bidang tanah yang tidak sepenuhnya free and clear sehingga memerlukan usaha yang *extra* dari KPKNL maupun satuan kerja.

Usaha tersebut dilakukan dengan koordinasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN mengenai usulan DIPA program pensertipikatan per provinsi guna kelancaran pelaksanaan sertifikasi di tiap-tiap provinsi. Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara bersama KPKNL Denpasar, Singaraja, Mataram, Bima, dan Kupang telah melakukan koordinasi dengan Kanwil ATR/BPN Provinsi Bali, Kanwil ATR/BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kanwil ATR/BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai usulan penyediaan anggaran program sertifikasi.

DIPA untuk sertifikasi ini diakomodir oleh Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN. Pelaksanaan program pensertipikatan BMN berupa tanah di tahun 2024 memang sangat dinamis terutama

mengenai objek pensertipikatan baik saat (1) persiapan berkas/dokumen, (2) *plotting*/penentuan titik koordinat untuk input pada aplikasi ATR/BPN, maupun (3) pengukuran di lapangan. Koordinasi yang baik guna mendukung pencapaian target kinerja juga dilakukan untuk proses pembuatan akun mitra dari satuan kerja untuk kelancaran pensertipikatan/digitalisasi data BMN berupa tanah pada Kementerian ATR/BPN.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Sebagaimana dipaparkan pada *section* indikator kinerja, capaian pensertipikat di 2024 melebihi target dengan realisasi 108,36%. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terutama terkait hal-hal sebagai berikut:

- a. **Perubahan atau pergantian objek:** Terjadi perubahan/pergantian objek dikarenakan kesalahan data, yaitu objek sertipikasi sudah diserahkan pada pihak Pemerintah Daerah dan kemudian diganti BMN berupa tanah yang lain. Perubahan/pergantian objek serta usulan penambahan objek sertipikasi ini terjadi selama tahun 2024 di provinsi Bali, provinsi Nusa Tenggara Barat maupun provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. **Perubahan kelompok:** Terdapat beberapa permasalahan pada objek sertipikasi sehingga Kanwil DJKN menyampaikan usulan pergeseran kelompok ke Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara dengan harapan apabila diakomodir akan mempercepat proses pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Hal ini terutama terjadi untuk Kategori 2, Kategori 3, dan Kategori 4.
- c. **Permasalahan dokumen dan fisik:** Terdapat permasalahan terkait ketidaklengkapan berkas/dokumen, tumpang tindih bidang tanah dengan aset milik pihak lain, pencatatan berganda dengan BUMN atau Pemerintah Daerah, dokumen pelepasan hak dari pemilik sebelumnya yang tidak tersedia. Selain itu terdapat permasalahan terkait batas-batas tanah yang tidak ditemukan serta keterbatasan SDM yang memiliki pengetahuan atas objek sertipikasi.

Faktor yang mendorong keberhasilan pelampauan target adalah koordinasi yang baik antara para pihak yang terlibat dalam program pensertipikatan BMN berupa tanah di wilayah Bali dan Nusa Tenggara maka pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah bisa diselesaikan dengan baik melampaui 100%. Koordinasi ini dinaungi dengan pembentukan Kelompok Kerja Program Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah Tingkat Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108/KM.6/2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tingkat Wilayah Program Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah Tahun 2024. Keanggotaan dalam kelompok kerja tersebut juga didukung dengan anggaran operasional sebesar Rp305.050.000,00.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang disediakan dalam DIPA untuk kegiatan monitoring dan evaluasi sertipikasi BMN berupa tanah pada wilayah kerja Kanwil Bali dan Nusa Tenggara untuk tahun anggaran 2024 adalah Rp211.137.000,00. Anggaran yang direalisasikan adalah Rp202.823.736,00 atau 96,06% dari anggaran yang disediakan. Rincian anggaran dan realisasi per sub komponen adalah sebagai berikut:

Rincian Output	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertipikasi	34.356.000	31.598.310	91,97%
Koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan Kementerian/Lembaga	84.150.000	79.125.000	94,03%
Penyusunan Daftar Nominatif dan Indikatif	92.631.000	92.100.426	99,43%
Total	211.137.000	202.823.736	96,06%

Rincian anggaran dan realisasi per akun belanja adalah sebagai berikut

Kode Akun	Nama Akun	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
521123	Belanja Honor Output Kegiatan	76.950.000	71.925.000	93,47%
521211	Belanja Bahan	6.119.000	5.795.000	94,71%
522151	Belanja Jasa Profesi	7.200.000	7.200.000	100,00%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	119.236.000	117.153.736	98,25%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.632.000	750.000	45,96%
Total		211.137.000	202.823.736	96,06%

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan sertipikasi BMN berupa tanah merupakan kegiatan yang bersifat kolaboratif antara Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang, Kanwil DJKN dan KPKNL selaku perpanjangan Pengelola Barang, dan Kantor Pertanahan sebagai pelaksana sertipikasi. Secara umum aktivitas yang kami lakukan dalam kegiatan sertipikasi ini adalah:

- Penyusunan daftar nominatif dan indikatif yang dilakukan secara berjenjang diawali koordinasi antara KPKNL dengan K/L di wilayah kerja Bali dan Nusa Tenggara. Koordinasi tersebut menghasilkan daftar nominatif dan indikatif tanah yang akan masuk dalam rencana pensertipikatan. Daftar tersebut dirinci menurut kelompok K1, K2, K3, dan K4 sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
- Konsolidasi atas daftar nominatif dan indikatif untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara oleh Kanwil. Konsolidasi tersebut melibatkan proses koordinasi dan konfirmasi guna memastikan bidang tanah yang diusulkan telah dikelompokkan secara tepat. Selain itu, aktivitas koordinasi dan konfirmasi bertujuan agar bidang tanah yang diusulkan memang telah siap untuk dilaksanakan pensertipikatan.
- Penyampaian daftar usulan sertipikasi kepada Kanwil BPN Provinsi Bali, Provinsi NTB, dan

Provinsi NTT. Jumlah yang diusulkan dapat diubah oleh Kanwil BPN sesuai dengan ketersediaan sumber daya dan anggaran di tiap-tiap Kanwil.

- d. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan K/L serta pembinaan ke KPKNL secara berkelanjutan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi, membandingkan perencanaan dan perkembangan realisasi serta memetakan kebutuhan revisi atau perubahan target/objek akibat dinamika yang terjadi dan ditemukan di lapangan.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Sebagaimana telah kami perkirakan, program pensertipikatan BMN berupa tanah sangat dinamis terutama mengenai objek pensertipikatan baik pada saat persiapan berkas/dokumen, *plotting*/penentuan titik koordinat untuk input pada aplikasi ATR/BPN maupun saat dilakukan pengukuran di lapangan. Beberapa risiko utama dari kegiatan sertifikasi di tahun 2024 adalah:

1. Kesalahan data awal.
2. Ketidaklengkapan dokumen historis.
3. Ketidakjelasan batas-batas dan tumpang tindih sertipikat dengan tanah masyarakat.
4. Objek sertifikasi dengan karakteristik khusus, misalnya tanah yang berasal dari reklamasi atas wilayah perairan.

Terhadap risiko-risiko tersebut, telah dilakukan mitigasi risiko antara lain koordinasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait untuk menelusuri dokumen historis, memetakan kronologis, memastikan batas-batas serta areal yang diindikasikan terdapat tumpang tindih, dan memetakan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tanah objek sertifikasi yang memiliki karakteristik khusus. Mitigasi risiko tersebut dapat menjaga tingkat risiko maksimum pada level 10 (*improbable likelihood moderate impact*) dan level 11 (*remote likelihood moderate impact*).

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dinamika pada saat proses pensertipikatan terlihat dari beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- a. Data yang tidak dimutakhirkan yang mengakibatkan tanah yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan berstatus BMD masih masuk dalam usulan pensertipikatan BMN. Sebagai tindak lanjut penyelesaiannya, tanah tersebut diganti dengan objek yang lain.
- b. Situasi di mana sumber pendanaan perolehan tanah berbeda dengan nama yang tercantum dalam dokumen hak atas tanah. Terdapat tanah milik Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dan telah terbit SHP ternyata perolehannya berasal dari APBN pada Kementerian Pertanian. Tanah tersebut awalnya masih masuk dalam target sertifikasi pada lingkup Kanwil Bali dan Nusra. Situasi menjadi semakin kompleks karena SHP atas nama Pemprov Bali hilang. Sebagai tindak lanjut

penyelesaiannya, pihak Pemda bersedia melepaskan hak atas SHP setelah terpilihnya gubernur yang baru. Selain itu, telah dilakukan deliniasi dalam rangka pengamanan fisik aset.

- c. Situasi tumpang tindih antara tanah BMN dengan tanah milik masyarakat. Sebagai tindak lanjutnya, dilakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada K/L dan masyarakat pemilik tanah untuk menelusuri historis kepemilikan dan pencatatan hak.
- d. Kebutuhan waktu penyelesaian yang lebih panjang atas tanah-tanah yang memiliki karakteristik khusus. Sebagai contoh, terdapat tanah milik satuan kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa merupakan tanah reklamasi yang termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga memerlukan rekomendasi dari level eselon I atau menteri. Sebagai tindak lanjutnya, dilakukan pemantauan atas perkembangan terbitnya rekomendasi tersebut.

Rencana aksi ke depan

Guna mendukung capaian kinerja persentase barang milik negara berupa tanah yang disertifikatkan, terdapat beberapa rencana aksi yang perlu dilakukan yaitu:

- a. Perlunya tahapan identifikasi dan verifikasi dalam menetapkan target sertipikasi secara akurat dan dapat dipastikan bahwa objek sertipikasi harus benar-benar free and clear.
- b. Pembaruan dan pengkinian (*update*) data wajib dilakukan secara berkala sehingga data bidang tanah diyakini keakuratannya mengingat masih ada kategori yang belum jelas mengenai dokumen BMN (sertipikat, dokumen kepemilikan lain, dokumen lainnya). Pengguna Barang belum bisa mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan dokumen kepemilikan.
- c. Perlunya dukungan anggaran yang memadai dan selaras dengan jumlah objek/target sertipikasi sehingga tidak menghambat pelaksanaan program sertipikasi.
- d. Penyelenggaraan kegiatan rapat rekonsiliasi, monitoring, dan evaluasi secara rutin dan intens baik di tingkat pusat maupun daerah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan sertipikasi di lapangan. Hal ini mengingat objek sertipikasi yang tersisa adalah BMN berupa tanah yang bermasalah.

b. (4b-N) Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki

struktur portofolio aset negara.

Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, dimana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait aset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti.

Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa persetujuan pengelola barang.

Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

1. Komponen A = "(Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya/ Jumlah target aset yang akan dievaluasi dan disampaikan rekomendasinya)" NUP
2. Komponen B = "(Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker/ Jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker)"
3. Paket Capaian = (Komponen A x 80%) + (Komponen B x 20%)

Adapun *trajectory* indikator kinerja persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 4: Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif (4b-N Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset))							
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	22,17%	44,49%	44,94%	101,37%	101,37%	127,6%	127,6%	
Capaian	221,70%	139,03%	140,44%	126,71%	126,71%	127,60%	127,60%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%	-	100%	-	-	127,6%
2023	100%	-	100%	-	-	122,91%
2022	100%	-	100%	-	-	117,60%

2021	100%	-	100%	-	-	110,09%
2020	100%	-	100%	-	-	107,82%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tingkat capaian unit kerja dalam persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) tahun 2024, telah dilakukan *extra effort* berupa pendampingan dan monitoring pengisian lembar kerja evaluasi pada aplikasi SIMAN Portofolio. Pendampingan dan monitoring ini dimaksudkan agar data yang diunggah akurat.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Koordinasi yang baik dengan KPKNL selaku pelaksana survei.
2. Penyusunan target triwulanan guna memantau progres pelaksanaan evaluasi kinerja BMN.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan dalam pencapaian indikator kinerja Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset). Pelaksanaan kegiatan - kegiatan ini diintegrasikan dengan kegiatan Bidang PKN yang lainnya, sehingga secara umum terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan persentase evaluasi kinerja BMN diantaranya adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian target KPKNL serta koordinasi terkait permasalahan yang ada dan solusinya.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu keterlambatan penyelesaian evaluasi kinerja BMN. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko diantaranya dengan koordinasi dengan KPKNL.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat masalah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu data dari instansi lain sebagai pendukung pengisian portofolio aset tidak lengkap.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan koordinasi dengan instansi penyedia data untuk mendapatkan data terbaru.

Rencana aksi ke depan

Guna menjaga capaian persentase evaluasi kinerja BMN tetap tinggi, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Koordinasi yang baik dengan KPKNL selaku pelaksana survei.
2. Penyusunan target triwulanan guna memantau progres pelaksanaan evaluasi kinerja BMN.

5. Sasaran Strategis: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif

Pelaksanaan pelayanan kekayaan negara dan lelang yang efektif mencakup berbagai aspek penting untuk memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Dalam sasaran strategis ini, DJKN berkomitmen dalam mewujudkan:

- a. Pengurusan piutang negara melalui percepatan penyelesaian BKPN, restrukturisasi, serta proses hukum lainnya dalam mencapai saldo berkas kasus piutang negara yang minimal.
- b. Efektivitas pelaksanaan layanan lelang dalam mendapatkan nilai yang optimal yang juga berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mengidentifikasi 2 indikator kinerja yaitu:

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
SS: Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif				111,52%
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	75%	72,72%	103,04%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%	115,30%	120%

Uraian mengenai indikator kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. (5a-CP) Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

Indikator kinerja persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022.

Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda. Output Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemda yang berdampak pada penurunan saldo BKPN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa:

1. BKPN Lunas (SPPNL);
2. BKPN Penarikan (SPPNS);

3. BKPN Dikembalikan (SKPPN);
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat);
6. BKPN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;
7. BKPN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;

dan telah di *update* dan *upload* dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya dilakukan *review* oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh KP DJKN (Direktorat PKKN).

Indikator kinerja ini memiliki kaitan dengan indikator kinerja persentase penurunan outstanding piutang negara dan indikator kinerja persentase penerimaan negara dari unsur PNBPN berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL. Tapi tidak semua penyelesaian BPKN menghasilkan PNBPN. Apabila suatu piutang ditetapkan sebagai Piutang Negara Sementara Tidak dapat Ditagih setelah dilakukan upaya penagihan yang optimal, maka hanya akan mengurangi saldo BKPN dan outstanding piutang negara. Namun demikian, apabila dikemudian hari terdapat informasi mengenai keberadaan dan/atau kemampuan debitur dalam melunasi hutang, berkas tersebut dapat diaktifkan kembali.

Indikator kinerja ini diukur menggunakan metode *minimize* yaitu semakin kecil realisasi (saldo akhir BKPN) maka semakin tinggi nilai capaian kinerja. Adapun *trajectory* indikator kinerja Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 5: Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif (5a-CP) Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara							
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	96%	90%	90%	80%	80%	75%	75%	Min/ TLK
Realisasi	98,37%	88,54%	88,54%	82,87%	82,87%	74, 58%	72,72%	
Capaian	97,53%	101,62%	101,62%	96,41%	96,41%	100,56%	103,04%	
Nilai Kinerja	97,53%	101,62%	101,62%	96,41%	96,41%	100,56%	103,04%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	75%	-	-	-	-	72,72%

2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja, telah dilakukan *extra effort* berupa pendampingan/asistensi kegiatan pengurusan piutang negara melalui pengurusan sederhana kepada KPKNL dalam kegiatan penagihan kepada debitur di lapangan serta koordinasi dengan penyerah piutang membahas solusi penyelesaian piutang yang diurus PUPN.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Percepatan penyelesaian berkas kasus piutang negara untuk melakukan angsuran/pelunasan.
2. Terhadap penanggung yang tidak ada kemampuan untuk membayar atau tidak diketahui keberadaannya segera diarahkan untuk dilakukan PSBDT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai indikator kinerja ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	Rp37.944.000,00	Rp30.407.000,00	Telah diselesaikan sebanyak 688 BKPN
2.	Bimbingan Teknis/sosialisasi/FGD Bidang Piutang Negara	Rp37.824.000,00	Rp36.364.825,00	Telah dilakukan bimbingan teknis, sosialisasi, dan FGD kepada petugas pengurus piutang di KPKNL

*kegiatan ini memiliki kaitan dengan IKU yang lain

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang

dibebankan sudah terpenuhi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

1. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kepada seksi Piutang Negara pada KPKNL.
2. Koordinasi dan sosialisasi dengan para penyerah piutang bersama-sama dengan KPKNL.
3. Sosialisasi PMK 30 Tahun 2024 terkait dengan *crash program* penyelesaian piutang negara melalui pemberian keringanan utang.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu banyaknya BKPN yang tidak dapat diselesaikan, yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 11. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko diantaranya dengan:

1. Koordinasi, Monev Berkala, Bimbingan Teknis, Pembinaan Langsung, atau melalui media komunikasi lainnya, dalam upaya mengidentifikasi kendala permasalahan, menyusun strategi serta tindak lanjut penyelesaian.
2. Meminta Prognosa kepada KPKNL dalam upaya memenuhi Target Realisasi Capaian Kinerja.
3. Melakukan pemantauan progres perkembangan.

Namun demikian, tingkat risiko tetap diproyeksikan pada level 11.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

1. Profil BKPN tanpa jaminan atau dengan jenis jaminan lain-lain dan ketidakmampuan debitur untuk menyelesaikannya.
2. Penyerahan pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh penyerah piutang namun debitur dan tempat usahanya berlokasi diluar wilayah kerja KPKNL.
3. Penyerahan piutang negara yang tidak didukung dengan dokumen dan lampiran dokumen pendukung yang memadai.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah – langkah, yaitu:

1. Pendekatan persuasif kepada debitur sehingga memperbesar potensi penyelesaian pengurusan.
2. Koordinasi dengan Penyerah Piutang dan KPKNL yang memiliki satu wilayah kerja yang sama dengan domisili penanggung utang.
3. Komunikasi kepada penyerah piutang dan melakukan penelitian penyerahan. Apabila tidak memenuhi unsur adanya dan unsur besarnya piutang negara maka dikomunikasikan secara

informal dan formal untuk penolakan penyerahan piutang.

Rencana aksi ke depan

Rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan pendekatan persuasif sehingga memperbesar potensi penyelesaian pengurusan.
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi persuasive dengan Penyerah Piutang dan KPKNL yang memiliki satu wilayah kerja yang sama dengan domisili penanggung utang sebelum dilakukan penyerahan kepada PUPN/KPKNL.

b. (5b-CP) Persentase Produktivitas Lelang

Tujuan dari indikator kinerja ini adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif. Indikator kinerja ini memperhitungkan antara jumlah lot laku lelang per jenis lelang dengan frekuensi lelang dengan formula :

$$\left(\left(\frac{\sum \left(\frac{\% \text{ Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}}{\text{Target \% Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}} \right)}{\text{Jumlah Jenis Lelang yang dilaksanakan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang}}{\text{Target Frekuensi Lelang}} \times 60\% \right) \right)$$

Rincian target persentase lot laku lelang berdasarkan jenis lelang adalah sebagai berikut :

1. lelang noneksekusi sukarela : 75%
2. lelang noneksekusi wajib : 55%
3. lelang eksekusi HT : 5%,
4. lelang eksekusi selain HT : 25%

Adapun *trajectory* indikator kinerja persentase realisasi pokok lelang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 5: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif (5b-CP) Persentase produktifitas lelang							
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%	Max/ TLK
Realisasi	56,21%	74,01%	74,01%	89,59%	89,59%	115,30%	115,30%	
Capaian	187,37%	164,47%	164,47%	149,32%	149,32%	129,55%	129,55%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	
2024	89%	-	-	-	115,30%
2023	80%	-	34%*	36%*	94,86%
2022	36%	-	34%*	-	43,84%
2021	35%	-	34%*	-	48,94%
2020	34%	32%*	32%*	32%*	46,09%

*Sumber: LAKIN DJKN 2023

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Capaian realisasi pada Tahun 2023, tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengingat pada tahun 2023 terdapat perubahan manual IKU dengan memasukkan unsur frekuensi lelang dalam formula Produktivitas. Perubahan formula disebabkan adanya pembahasan pada saat refinement IKU yang diselenggarakan mulai akhir tahun 2022.

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pokok lelang tahun 2024, telah dilakukan *extra effort* berupa :

1. Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan PL II baik melalui Telepon, WAG, Zoom, Teams Meeting dan lain sebagainya.
2. Berkoordinasi dengan pemohon lelang dari Perbankan dalam rangka meningkatkan realisasi capaian pokok lelang.
3. Melaksanakan penggalian potensi lelang terhadap Perbankan.
4. Mengadakan lelang expo.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang *continues improvement*.
2. Pelaksanaan rangkaian lelang expo dalam rangka peringatan hari lelang.

3. Bersama dengan direktorat lelang dan KPKNL melakukan sosialisasi aplikasi lelang.go.id V2.
4. MOU dan koordinasi intensif dengan *stakeholder* lelang.
5. Penggalian Potensi Lelang.
6. Lelang serentak.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai indikator kinerja ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Sosialisasi / Edukasi dibidang lelang	24,685,000	23,209,400	Kegiatan berupa: 1. Bimtek/Sosialisasi/FGD di Bidang Lelang Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang 2. Telah terselenggara 2 kali kegiatan Sosialisasi dengan mengundang seluruh Pelelang lingkup Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara
2.	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta tindak lanjut atas Pelaksanaan Lelang	86,172,000	84,683,482	Kegiatan pemeriksaan Minuta dengan Output LHP, BAP dan KKP yang dilaksanakan tahun 2024, dengan rincian yaitu: 1. KPKNL Denpasar periode Minuta Semester 2 Tahun 2021 s.d Tahun 2023 2. KPKNL Bima periode Minuta tahun 2022 dan 2023 3. KPKNL Mataram periode minuta tahun 2022 dan 2023 4. KPKNL Kupang periode minuta Semester 2 Tahun 2022 s.d Tahun 2023 5. KPKNL Singaraja periode pemeriksaan minuta Semester 2 Tahun 2021 s.d Tahun 2023
3	Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	100.000.000	99,339,248	Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang
4	Penggalian Potensi Lelang	100.000.000	86.059.384	Penggalian potensi lelang pada <i>stakeholder</i> (KPKNL, Balai Lelang dan PL 2), perbankan maupun UMKM
5	Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	13,408,000	6,680,000	Pemberian rekomendasi/perizinan Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II

*penggunaan anggaran ini juga berkaitan dengan indikator kinerja yang lain

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian produktifitas lelang

diantaranya adalah:

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi capaian secara berkala baik capaian PL I, PL II dan Pegadaian.
2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan secara triwulanan.
3. Sosialisasi aplikasi/peraturan/kebijakan lelang terkini terhadap *stakeholder* baik tatap muka maupun daring.
4. Pembinaan secara intensif.
5. Kegiatan lelang serentak PL II.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu banyaknya lelang eksekusi hak tanggungan tidak ada penawaran, yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 19. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko diantaranya dengan pemantauan dan penggalian potensi lelang kepada pihak perbankan serta melakukan koordinasi atau pembinaan kepada *stakeholder* dan KPKNL untuk penggalian potensi lelang. Dengan demikian diproyeksikan ketiga risiko tersebut akan menjadi rendah pada level 11.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, masalah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu adanya pembatalan lelang dan lelang tidak ada penawaran. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah – langkah, yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan PL II baik melalui Telepon, WAG, Zoom, Teams Meeting dan lain sebagainya.
2. Berkoordinasi dengan pemohon lelang dari perbankan dalam rangka meningkatkan realisasi capaian produktifitas lelang.

Rencana aksi ke depan

Guna terus meningkatkan persentase produktifitas lelang, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan terus berkoordinasi dengan pemohon lelang (perbankan) di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
2. Memberi usulan kepada perbankan/pemohon lelang agar menetapkan harga limit lelang dengan nilai likuidasi pada lelang ke-2 atau ke-3.
3. Penggalian potensi terhadap PL 2, Balai Lelang dan UMKM.

6. Sasaran Strategis: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mengidentifikasi 1 indikator kinerja yaitu:

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
SS: Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional				120%
6a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	0,76%	120%

Uraian mengenai indikator kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. (6a-CP) Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Indikator kinerja (IKU) Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian merupakan indikator kinerja yang dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. IKU ini bertujuan memastikan konsistensi dan akurasi dalam penilaian aset, membantu mengidentifikasi selisih dan memberikan dasar untuk penyesuaian prosedur penilaian.

Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah 40% dari jumlah deviasi pemanfaatan ditambah 60% dari jumlah deviasi pemindahtanganan dibagi dengan laporan penilaian yang sudah dibuat dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Apabila terdapat deviasi, maka tingkat deviasi tersebut harus dicatat sampai dengan adanya keterangan resmi bahwa tindak lanjut dari hasil penilaian tersebut tidak tereksekusi/tidak dapat digunakan.

Perhitungan ini membantu mengevaluasi efektivitas metode penilaian yang digunakan dan memastikan aset negara dinilai secara tepat.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan pengelolaan BMN. Adapun Objek Penilaian berupa BMN baik pada pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan tujuan untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Apabila terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Mempertimbangkan efektivitas dalam ketergunaan hasil penilaian maka terdapat kondisi pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa, yaitu pengakuan deviasi baru dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti di sisi Pengguna Barang (pemanfaatan/pemindahtanganan).

Indikator kinerja ini diukur secara *minimize* yang artinya semakin kecil realisasi (deviasi hasil penilaian) maka akan semakin baik capaian kinerja. Adapun *trajectory* indikator kinerja persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 6: Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional (6a-CP) Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian								
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	Min/TLK
Realisasi	0,04%	0,07%	0,07%	1,38%	1,38%	0,81%	0,76%		
Capaian	199,75%	199,56%	199,56%	191,38%	191,38%	194,94%	195,25%		
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	16%	-	26%	-	-	0,76%
2023	25%	-	27%	27%*	-	0,24%
2022	19%	-	28%	28%*	-	1,75%

2021	22%	-	29%	29%*	-	4,91%
2020	30%	30%*	30%	30%*	-	3,76%

*Sumber: LAKIN DJKN 2023

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Dalam IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian, nilai yang disampaikan dalam laporan penilaian dapat digunakan sebagai dasar persetujuan atau penolakan pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN sampai dengan tindak lanjut realisasi penggunaan nilainya. Bidang Penilaian melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan kepada para PFPP di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara melalui kegiatan sosialisasi dan *Forum Group Discussion* (FGD) baik terkait Manual IKU, pemenuhan realisasi, dan strategi pencapaiannya;
2. Memberikan pemahaman mengenai mekanisme Kaji Ulang maupun kegiatan pemaparan (*peer review*) konsep laporan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan secara ketat oleh para Penilai sebagai bentuk pengendalian kualitas laporan penilaian;
3. Meminta kepada para PFPP di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara agar aktif berkoordinasi dengan pihak Pemohon dalam rangka memperoleh gambaran perihal objek penilaian maupun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi Pemohon dalam pengajuan permohonan;
4. Aktif berkoordinasi dengan para PFPP di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dalam media *Whatsapp Group* untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian;
5. Melakukan pemantauan atau monitoring secara berkala pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) dan realisasi IKU pada tautan monev capaian kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada <https://bit.ly/capkinbalinusra2024>.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Penetapan target kinerja triwulan memastikan pencapaian target sebesar 16% dan memberikan dasar untuk penilaian kinerja setiap 3 bulan. Target kinerja triwulan yang tidak tercapai (akan ditandai dengan warna merah) mempengaruhi penyusunan target berikutnya, menuntut perbaikan dan pencapaian yang lebih tinggi di triwulan berikutnya (akan ditandai

dengan warna hijau). Dengan target yang dipersempit menjadi triwulan, analisis dan perbaikan kinerja menjadi lebih mudah dilakukan. Sifat IKU Persentase Deviasi dengan target *minimize* (semakin kecil semakin baik).

Tabel Rincian Realisasi IKU Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian

No	Unit	Raw Data Tahun 2024	Realisasi s.d. Januari 2024	Realisasi s.d. Februari 2024	Realisasi s.d. Maret 2024	Realisasi s.d. April 2024	Realisasi s.d. Mei 2024	Realisasi s.d. Juni 2024	Realisasi s.d. Juli 2024	Realisasi s.d. Agust 2024	Realisasi s.d. Sept 2024	Realisasi s.d. Okt 2024	Realisasi s.d. Nov 2024	Realisasi s.d. Des 2024
1	Lingkup Kanwil	16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	KPKNL Denpasar	16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	KPKNL Singaraja	16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,42%	8,39%	7,96%	7,22%	4,59%	4,28%
4	KPKNL Mataram	16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	KPKNL Bima	16%	0,43%	0,37%	0,25%	0,56%	0,49%	0,43%	0,34%	0,34%	0,33%	0,31%	0,28%	0,26%
6	KPKNL Kupang	16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kanwil DJKN Balinusura			0,07%	0,06%	0,04%	0,09%	0,08%	0,07%	2,13%	1,46%	1,38%	1,26%	0,81%	0,76%

Terlihat dalam tabel realisasi IKU Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian di atas, realisasi pada tingkat KPKNL maupun Kanwil sepanjang tahun 2024 sebenarnya relatif berhasil memastikan konsistensi dan akurasi dalam penilaian aset sehingga dapat tereksekusi melalui jalur pemanfaatan maupun pemindahtanganan, dengan masuknya setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Namun demikian dalam pemenuhan realisasi capaian IKU Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian ini, Bidang Penilaian Kanwil Bali dan Nusa Tenggara senantiasa berkoordinasi aktif dan mengingatkan para PFPP di lingkungan Kanwil Bali dan Nusa Tenggara untuk melaksanakan seluruh tahapan kegiatan penilaian dengan berdasarkan data dan informasi akurat dan relevan yang diiringi dengan kegiatan pemaparan (*peer review*) konsep laporan sebagai bentuk pengendalian kualitas laporan penilaian, sehingga diharapkan laporan penilaian yang dihasilkan nantinya dapat benar-benar mencerminkan kondisi pasar pada saat tanggal penilaian.

Selain itu laporan penilaian yang dihasilkan para PFPP di KPKNL juga harus dimintakan Kaji Ulang secara tertib kepada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penyampaian kepada Pemohon, yang selanjutnya para Penilai di Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara akan melakukan Kaji Ulang dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima permintaan Kaji Ulang. Sesuai laporan analisis hasil kaji ulang, hasil kaji ulang laporan penilaian dari Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara kepada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara disampaikan rata-rata dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

Dengan upaya berkesinambungan dari Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dalam mengawal realisasi capaian IKU Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian tersebut, diperoleh realisasi IKU sebesar 0,76% di atas target 16% atau 120%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam pelaksanaan kinerja tahun 2024 dan pemenuhan IKU baik IKU Kemenkeu-Two, IKU *Mandatory* maupun IKU lainnya, Bidang Penilaian memperoleh sumber daya anggaran sebesar

Rp107.644.000 yang terdiri atas kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi/FGD sebesar Rp16.512.000, kegiatan Survei Lapangan dan Penilaian sebesar Rp19.664.000, kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah Rp12.928.000, kegiatan survei dan penyusunan DKPB tahun 2025 sebesar Rp36.204.0000, dan kegiatan Survei Basis Data sebesar Rp22.336.000. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp100.653.788 atau sebesar 93,66% dari pagu. Dengan demikian menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Sedangkan untuk sumber daya manusia, secara struktural Bidang Penilaian didukung oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kepala Seksi, dan 2 (dua) orang Pelaksana. Namun demikian secara pelaksanaan tugas operasional, Bidang Penilaian dibantu pula oleh 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Madya dan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Realisasi capaian kinerja di Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan capaian 120% untuk kedua indikator yang dianalisis. Hal ini dicapai melalui implementasi strategi-strategi, seperti pelaksanaan pembinaan intensif kepada Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP), pemantauan realisasi IKU secara berkala, dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) untuk mendukung transparansi dan efektivitas.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang pencapaian kinerja meliputi:

1. Pembinaan dan Pelatihan:
 - a. Sosialisasi rutin terkait Manual IKU dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - b. *Forum Group Discussion* (FGD) yang membahas strategi pencapaian kinerja dan solusi atas kendala operasional.
2. Penguatan Sistem Informasi:
 - a. Pemantauan capaian kinerja melalui Sistem Informasi Penilaian (SIP).
 - b. Pengembangan fitur analisis untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.
3. Koordinasi Antar-Unit:
 - a. Komunikasi intensif dengan KPKNL melalui media seperti *Whatsapp Group* untuk membahas kendala lapangan.
 - b. Distribusi tugas secara adil untuk mengurangi beban kerja yang tidak merata.
4. Peningkatan Kualitas Laporan Penilaian:

- a. Pelaksanaan pemaparan konsep laporan (*peer review*) untuk memastikan laporan memenuhi standar kualitas.
- b. Proses kaji ulang yang ketat sebelum laporan disampaikan kepada pemohon.

Kegagalan dalam pencapaian sebagian target pada triwulan tertentu, seperti di KPKNL Denpasar, diidentifikasi sebagai akibat dari keterbatasan SDM dan beban kerja yang tidak merata. Namun, melalui langkah-langkah mitigasi yang cepat dan terukur, target tahunan tetap berhasil dicapai dengan baik.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN.

Bidang Penilaian Kanwil Bali dan Nusa Tenggara senantiasa melakukan upaya mitigasi risiko atas pencapaian realisasi IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian dengan senantiasa melakukan kegiatan pengendalian kualitas laporan penilaian. Selanjutnya meminta kepada para PFPP di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara agar selalu aktif berkoordinasi dengan pihak Pemohon dalam rangka memperoleh gambaran perihal objek penilaian maupun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi Pemohon dalam pengajuan permohonan. Hal ini paling tidak dapat menjadi masukan bagi PFPP dalam pelaksanaan penilaian.

Adanya media sosial *Whatsapp Group*, turut menyumbang kontribusi dalam hal koordinasi dengan para PFPP di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian sehingga hal-hal yang menjadi kendala maupun hambatan dalam pelaksanaan penilaian dapat terselesaikan dengan baik.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam memenuhi pencapaian target IKU Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian, ditemui kendala yang mengerucut pada kurangnya kualitas pada laporan penilaian yang tergambar dalam laporan analisis hasil kaji ulang yang secara triwulanan disampaikan oleh Kanwil Bali dan Nusa Tenggara kepada Kantor Pusat DJKN dhi. Direktorat Penilaian.

Bidang penilaian Kanwil Bali dan Nusa Tenggara berupaya melakukan untuk mengelola risiko

deviasi dalam pelaksanaan penilaian dengan rata-rata deviasi ketergunaan sekitar 2% dari target awal 16%, yang selanjutnya terus meningkat menjadi lebih kurang 0,76% (120%). Kualitas laporan penilaian tetap menjadi fokus utama, dengan melakukan langkah antisipasi berupa:

1. Pelaksanaan kegiatan pemaparan (*peer review*) konsep laporan penilaian
 - a. Pemaparan konsep laporan: Konsep laporan penilaian Penilaian dipaparkan di hadapan penilai lain untuk mendapat masukan.
 - b. Pemeriksaan konsep laporan penilaian: Setiap hal/bagian/kategori dalam diperiksa untuk memastikan kebenaran perhitungan dan pendekatan.
 - c. Identifikasi kesalahan: Kesalahan data atau perhitungan segera diketahui dan diperbaiki.
 - d. Penguatan penjelasan dan argumentasi: Masukan dari *peer review* digunakan untuk memperkuat penjelasan dan argumentasi penilai dalam menganalisis perhitungan nilai maupun penyusunan laporan penilaian.
2. Memperkuat mekanisme kaji ulang laporan penilaian, sebagai berikut:
 - a. Laporan Kaji Ulang ke Kantor Pusat: Laporan dikirim ke kantor pusat untuk kaji ulang.
 - b. Proses Berjenjang: Laporan dikaji ulang dari kantor operasional ke Kanwil, dan ke kantor pusat jika diperlukan.
 - c. Validasi Laporan: Memastikan laporan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Diharapkan dengan langkah-langkah tersebut, dapat meningkatkan kualitas laporan penilaian dan memastikan bahwa laporan penilaian akurat dan valid, serta keputusan yang diambil oleh pihak terkait berdasarkan laporan penilaian tersebut, akan tepat.

Rencana aksi ke depan

Setiap organisasi dengan kepemilikan aset berupaya mengelola aset tersebut secara optimal untuk memastikan kelangsungan operasionalnya. Aset dapat didefinisikan sebagai barang atau objek yang dimiliki dan mempunyai nilai ekonomis, komersial, atau nilai pertukaran, yang dapat dimiliki atau digunakan oleh lembaga, organisasi, atau individu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, BMN adalah aset yang diperoleh melalui dana APBN atau sumber lain yang legal. Aset-aset ini meliputi tanah, gedung, jalan, kendaraan, dan alat kesehatan, yang harus dikelola secara efektif demi kepentingan publik.

Pengelolaan aset negara merupakan tanggung jawab Kementerian Keuangan Republik Indonesia, melalui Direktorat Kekayaan Negara (DJKN) yang berperan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terkait kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, sebagai instansi vertikal, bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi terkait kekayaan negara dan lelang.

Dalam konteks pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Bidang Penilaian sebenarnya telah menerapkan pengendalian internal melalui pendekatan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Enterprise Risk Management* (COSO ERM) yang merupakan kerangka kerja manajemen risiko korporasi yang diterbitkan oleh COSO, dengan selalu menerapkan dan menandatangani Piagam Pakta Integritas dalam pelayanan penilaian kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan melakukan upaya pengendalian kualitas laporan penilaian yang dihasilkan oleh para Penilai Pemerintah.

Dengan pemantauan pengendalian waktu penyelesaian layanan penilaian melalui Sistem Informasi Penilaian (SIP) membantu organisasi mengelola risiko secara efektif, terintegrasi, dan terstruktur. Selain itu Bidang Penilaian terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar unit melalui koordinasi intensif, pelatihan rutin dan diskusi (*Forum Group Discussion*) berkala yang fokus pada standar operasional, pencapaian target, dan pemahaman risiko. Dalam penetapan target kinerja Bidang Penilaian disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan setiap tahunnya. IKU tersebut berfungsi sebagai tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur efektivitas serta efisiensi dalam penilaian.

7. Sasaran Strategis: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan teknologi informasi merupakan modal dasar yang dibutuhkan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan optimal. Organisasi dan proses bisnis yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menciptakan ekosistem kerja yang kondusif. SDM yang berkompentensi tinggi merupakan modal organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Teknologi informasi yang mumpuni sangat dibutuhkan dalam mendorong Kemenkeu agar relevan dengan perkembangan teknologi saat ini.

Keandalan Sistem Informasi dalam dunia yang serba digital menjadi salah satu hal yang penting (salah satunya dalam mewujudkan dan menjaga reputasi Kementerian Keuangan secara khusus dan Pemerintah secara umum di mata masyarakat/*stakeholder*). Pengelolaan layanan TIK yang andal tercermin dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan atau *Business Impact Analysis* (BIA).

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mengidentifikasi 3 indikator kinerja yaitu:

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
SS: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				117,44%
7a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	95,48	112,33%
7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120%
7c-N	Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	75%	154,27%	120%

Uraian mengenai indikator kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. (7a-N) Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian

keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan *review* atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Pengelolaan kinerja individu (pegawai) dilakukan oleh Subbagian Sumber Daya Manusia, sedangkan pengelolaan kinerja organisasi dan risiko dilakukan oleh Seksi Kepatuhan Internal. Nilai indeks kualitas didapatkan dari hasil penilaian Kantor Pusat DJKN. Adapun *trajectory* indikator kinerja persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 7: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (7a-N) Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko								
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	85	85	85	85	85	85	85	85	Max/ Avg
Realisasi	98,4	93,17	93,17	94,08	94,08	95,48	95,48		
Capaian	115,76%	109,61%	109,61%	110,68%	110,68%	112,33%	112,33%		
Nilai Kinerja	115,76%	109,61%	109,61%	110,68%	110,68%	112,33%	112,33%		

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	85	-	-	-	-	95,48
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko tahun 2024, telah dilakukan *extra effort* yaitu mendorong PIC kinerja pada tiap bidang/bagian untuk mengikuti *e-learning* pengelolaan kinerja melalui klc2.kemenkeu.go.id. Dengan mengikuti *e-learning* maka diharapkan para PIC kinerja dari tiap bidang memiliki pemahaman dasar tentang pengelolaan kinerja dan *update* tentang ketentuan pengelolaan kinerja terbaru.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Membentuk tim pengelola kinerja dan pengelola risiko pada awal tahun 2024.
2. Penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja pada awal tahun 2024.
3. Penyusunan profil risiko dan rencana mitigasi risiko pada awal tahun 2024.
4. Pelaksanaan rapat dialog kinerja individu oleh para atasan langsung (pejabat eselon III kebawah) setiap bulan.
5. Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja organisasi (DKO) setiap bulan.
6. Pelaksanaan rapat dialog kinerja organisasi dan risiko (DKRO) setiap triwulan.
7. Tertib administrasi dan pelaporan manajemen kinerja dan risiko.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai indikator kinerja ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Implementasi Manajemen Risiko	Rp 13.008.000,00	Rp 13.008.000,00	1. Telah dilakukan pembinaan ke KPKNL yang berada di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara. 2. Telah menyusun dan menyampaikan laporan penanganan risiko tiap triwulan kepada Kantor Pusat DJKN. 3. Telah melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko tiap triwulan pada tahun 2024.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indeks kualitas manajemen kinerja dan pegawai diantaranya adalah:

1. Penyediaan sheet kolaborasi yang digunakan oleh para PIC kinerja pada tiap bidang/bagian untuk menyampaikan data capaian kinerja terkini untuk selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi oleh PIC kinerja organisasi.
2. Pelaksanaan one on one meeting dengan tiap bidang/bagian guna penyusunan profil risiko dan rencana aksi mitigasi risiko.
3. Penyediaan *sharing* folder bersama guna pendokumentasian capaian kinerja individu dan bukti dukung untuk selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi oleh PIC kinerja pegawai.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu kinerja individu pegawai tidak mendukung tercapainya kinerja unit/organisasi, yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 10. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko diantaranya dengan melaksanakan pengelolaan kinerja dan risiko, mulai dari perencanaan, penandatanganan perjanjian kinerja, pelaksanaan edukasi serta evaluasi dan mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan kinerja dan risiko dengan baik. Dengan demikian diproyeksikan risiko tersebut akan menjadi rendah pada level 5.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat masalah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

1. Kurangnya pemahaman pegawai dalam pelaksanaan manajemen kinerja individu, khususnya mengenai kegiatan – kegiatan yang harus dilaksanakan.
2. Lambatnya informasi mengenai realisasi capaian kinerja untuk indikator kinerja tertentu yang capaiannya diukur berdasarkan penilaian dari pihak eksternal.
3. Terdapat pengukuran IKU yang perlu disesuaikan agar lebih mencerminkan kinerja dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan langkah – langkah diantaranya:

1. Penyampaian jadwal kegiatan dan *to-do list* manajemen kinerja individu kepada tiap pegawai.
2. Koordinasi dengan PIC dari kantor pusat yang menangani pengukuran kinerja dari pihak eksternal.
3. Memberikan masukan refinement IKU dan manual IKU ke kantor pusat DJKN guna meningkatkan keandalan dan keakuratan pengukuran kinerja.

Rencana aksi ke depan

Guna menjaga Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko tetap baik, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Membentuk tim pengelola kinerja dan pengelola risiko pada awal tahun 2025.
2. Penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja pada awal tahun 2025.
3. Penyusunan profil risiko dan rencana mitigasi risiko pada awal tahun 2025.
4. Melakukan pengelolaan kinerja dan risiko dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun 2025.

b. (7b-N) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Indikator kinerja ini mengukur persentase banyaknya pegawai (pejabat eselon III/ pejabat eselon IV/JF setara dan pelaksana / jabatan fungsional setara) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Pegawai telah memenuhi kriteria pengembangan kompetensi pegawai apabila apabila pada tahun 2024:

1. Telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 40 jam pelajaran
2. Telah mengikuti minimal 1 dari usulan rencana pengembangan kompetensi
3. Telah mengikuti minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Jenis pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dikecualikan dari penghitungan indikator kinerja persentase pengembangan kompetensi pegawai yaitu:

1. Pegawai yang akan pensiun di tahun 2024
2. Pegawai yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan
3. Pegawai yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2024
4. Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2024 tidak diperhitungkan di unit barunya
5. Pegawai pada unit non-eselon".

Adapun *trajectory* indikator kinerja persentase pengembangan kompetensi pegawai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 7: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (7b-N) Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	29,27%	68,57%	68,57%	105%	105%	120%	120%	
Capaian	195,13%	171,43%	171,43%	140,00%	140,00%	120,00%	120,00%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%	-	-	-	-	120%
2023	100%	-	-	-	-	120%

2022	100%	-	-	-	-	120%
2021	100%	-	-	-	-	120%
2020	100%	-	-	-	-	120%

Tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ersentase pengembangan kompetensi pegawai, telah dilakukan usaha *extra* berupa penyampaian nota dinas capaian pegawai yang telah mengembangkan kompetensinya, halaman monitoring yang dapat diakses oleh seluruh pegawai, penyampaian informasi pelatihan *mandatory* (wajib) untuk para pegawai, serta pembuatan formulir pendataan pelatihan yang telah diikuti pegawai agar dapat diperoleh data yang komprehensif terkait pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan oleh pegawai.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Keinginan sebagian besar individu pegawai untuk mengembangngkan diri melalui pelatihan yang dibutuhkan dan memenuhi jam pelatihan yang ditentukan.
2. Monitoring dan evaluasi oleh unit Subbagian Sumber Daya Manusia.
3. Terdapat beberapa pelatihan yang wajib diikuti untuk para pegawai dari eselon I.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dilaksanakan melalui pelatihan jarak jauh, *e-learning*, dan pelatihan tatap muka, yang menggunakan anggaran dari unit penyelenggara dan/atau Sekretariat DJKN, serta tidak menggunakan sumber dana tertentu dalam anggaran Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Dengan demikian, secara umum terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Persentase pengembangan kompetensi pegawai diantaranya adalah:

1. Penyampaian informasi pelatihan *mandatory* (wajib) untuk para pegawai.
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan pengembangan kompetensi pegawai

secara berkala.

3. Pembuatan formulir pendataan pelatihan yang telah diikuti pegawai.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu tidak sesuai hard competency pegawai dengan bidang tugas, yang dipetakan pada awal tahun berada pada level

7. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko diantaranya dengan:

1. Menyampaikan informasi pemanggilan pelatihan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan serta Penugasan Sementara untuk dikonversi menjadi Jam Pelatihan
2. Mendorong para pegawai untuk menyelesaikan pelatihan/*e-learning* sehingga memenuhi 40 jamlat.

Dengan demikian diproyeksikan risiko tersebut akan menjadi rendah pada level 4.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

1. Terdapat Sebagian kecil pegawai yang memiliki motivasi rendah untuk mengembangkan kompetensi dan/atau memenuhi 40 jam pelatihan;
 2. Minimnya pelatihan wajib bagi para pegawai di awal hingga pertengahan tahun.
 3. Tidak adanya media bagi unit pengelola pegawai untuk mengetahui pelatihan yang diikuti pegawai secara otomatis tanpa adanya komunikasi dengan pegawai yang bersangkutan
- Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah – langkah, yaitu:

1. Pembuatan formulir pendataan pelatihan yang telah diikuti pegawai.
2. Penyampaian nota dinas capaian pegawai yang telah mengembangkan kompetensinya.

Rencana aksi ke depan

Guna menjaga ketercapaian target pengembangan kompetensi pegawai, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Menyampaikan nota dinas capaian pegawai yang telah mengembangkan kompetensinya
2. Menyediakan halaman monitoring yang dapat diakses oleh seluruh pegawai,
3. Menyampaikan informasi pelatihan *mandatory* (wajib) untuk para pegawai (jika ada),
4. Tetap menyediakan formulir pendataan pelatihan yang telah diikuti pegawai

c. (7c-N) Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi

Duta Transformasi DJKN merupakan tim kolaboratif beranggotakan *Change Agent* (Pejabat Administrator/Eselon III/Jabatan Fungsional Madya/setara) dan *Lighthouse Team* (Pejabat Pengawas/Eselon IV/Jabatan Fungsional Muda/setara dan/atau pelaksana) pada setiap unit

eselon II DJKN. Tujuan utama program Duta Transformasi adalah sebagai perpanjangan tangan pimpinan Kementerian Keuangan dalam memastikan kesamaan persepsi, percepatan internalisasi, dan menggali aspirasi Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan (RBTK) terhadap seluruh pegawai Kementerian Keuangan setidaknya pada unit kerja dan *stakeholder* terkait dimana yang bersangkutan ditugaskan.

Melalui program agen perubahan, Duta Transformasi, diharapkan manajemen perubahan dalam kerangka RBTK Kementerian Keuangan dapat terlaksana secara luas dan optimal. Tugas Duta Transformasi sebagai agen perubahan Kemenkeu diatur secara rinci dalam KMK tentang Penetapan Duta Transformasi Tahun 2024 dimana salah satunya adalah melaksanakan Program Kerja Duta Transformasi tahun 2024.

Program Kerja Duta Transformasi merupakan program kerja yang ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat atau *Central Transformation Office* (CTO) dalam rangka amplifikasi pesan perubahan dan pelaksanaan Program RBTK Kementerian Keuangan. Indikator ini mengukur rata-rata penyelesaian program kerja oleh Duta Transformasi untuk memastikan pesan perubahan dapat disampaikan dan pelaksanaan program RBTK Kemenkeu berjalan dengan efektif, yang menjadi tugas pimpinan unit untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan seluruh tugas duta transformasi yang berada di bawah kepemimpinannya selesai dilaksanakan.

Adapun *trajectory* indikator kinerja Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 7: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (7c-N) Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi							
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	5%	20%	20%	45%	45%	75%	75%	Max/ TLK
Realisasi	5%	95%	95%	103,03%	103,03%	137,37%	137,37%	
Capaian	100%	475%	475%	229%	229%	183%	183%	
Nilai Kinerja	100%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	75%	-	-	-	-	137,37%
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penyelesaian program kerja duta transformasi tahun 2024, telah dilakukan *extra effort* berupa sinergi dengan bidang/bagian lain pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara serta sinergi dengan Kemenkeu Satu Bali. Dengan adanya sinergi, diharapkan program kerja yang dapat dilakukan oleh Duta Transformasi menjadi lebih beragam dan menjangkau lebih banyak pihak.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melaksanakan peran sebagai inisiator atau kolaborator dalam penyelenggaraan kegiatan yang berdampak pada penguatan budaya dan pelaksanaan sikap dasar dan pelaku efektif Kemenkeu berdasarkan KMK 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian antara lain :
 - a. Mengikuti kegiatan *sharing session* Forum Paksi Bali.
 - b. Mengadakan *sharing session* program pengendalian gratifikasi baik internal maupun eksternal Kementerian Keuangan.
 - c. Mengadakan kegiatan *sharing session* Optimalisasi pengembangan lingkungan kerja yang nyaman dan penggunaan ruangan yang efektif.
 - d. Peningkatan budaya dan nilai-nilai Kemenkeu pada DJKN *Goes To Campus* di Universitas Pendidikan Ganesha.
 - e. Melakukan Sosialisasi budaya dan nilai-nilai Kemenkeu.
 - f. Menginisiasi Rapat koordinasi Tim Sekretariat Bersama Kemenkeu Bali, untuk penyelenggaraan kegiatan Bersama Kemenkeu Satu.
 - g. Melakukan Internalisasi nilai-nilai kementerian Keuangan untuk pegawai di lingkungan Kanwil dan KPKNL.
2. Melaksanakan peran sebagai inisiator atau kolaborator dalam penyelenggaraan kegiatan yang berdampak pada hidup sehat pegawai, baik jasmani maupun rohani di unitnya masing-masing, antara lain terkait:
 - a. Membentuk tim pengembangan budaya Kemenkeu Satu dengan kegiatan Seni Tari,

- b. Tabuh, dan suara. Output kegiatan antara lain menari bersama Kemenkeu Satu Provinsi Bali dalam rangka hari tari dunia, tari dan tabuh dalam rangka kegiatan keagamaan/bintal (pidalan hari natal Bersama) atau dan acara penyambutan kunjungan kerja Menteri/Wamen, serta untuk memeriahkan kegiatan pekan UMKM.
 - c. Pelaksanaan olahraga bersama Kemenkeu Satu.
 - d. Pelaksanaan Donor Darah Bersama Kemenkeu Satu.
 - e. Pembinaan mental agama islam dan buka bersama.
 - f. Mengadakan *sharing session* "Tri Kaya Parisudha" sebagai Tuntunan ASN Berintegritas.
 - g. Pembinaan mental kejiwaan pegawai-Gerakan masyarakat hidup sehat.
 - h. Pembentukan tim pengembangan dan pemeliharaan budaya Kemenkeu Provinsi Bali.
 - i. Pembinaan Mental kejiwaan - menjaga kesehatan mental melalui Program Pola Makan Sehat.
 - j. Pembinaan Mental Ideologi - Pengetahuan Sejarah dengan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan.
 - k. Pembinaan Mental Rohani - Kajian Pelaksanaan Puasa Ramadhan dan Pembagian Takjil.
 - l. *Sharing session* - Internalisasi SIMAN V.2.
 - m. *Sharing session* - Kiat Memperoleh Beasiswa LPDPM.
 - n. Jumat Sehat - Pola Hidup Sehat dan Menjaga Ketahanan Tubuh Pegawai Pelaksanaan olahraga dan program pola makan sehat.
3. Mengikuti pengembangan kompetensi terkait pengolahan data atau *data analytics*
 - a. Kelas Luring yang dilaksanakan di Kanwil DJKN Bali Nusra dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat TSI, dengan kegiatan *sharing session data analytic* dengan menggunakan aplikasi pengembangan dari Direktorat TSI dan dengan bantuan AI.
 - b. Kelas *E-learning* yang diikuti dari *Lighthouse* yang berada di Kanwil maupun di KPKNL.
 4. Mengikuti pengembangan kompetensi terkait pengarusutamaan gender secara *E-learning* oleh Duta Transformasi dan seluruh *lighthouse*.
 5. Mengikuti sosialisasi terkait Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidang Keuangan Negara dan Program Layanan Bersama dan Mensosialisasikan materi Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidang Keuangan Negara dan Program Layanan Bersama.
 6. Menyusun dan menyampaikan proposal rencana proyek perubahan yang berdampak pada perbaikan layanan unit, yang diimplementasikan secara kolaboratif antar/lintas unit di Kemenkeu. Judul Proposal yang diajukan adalah EMANSIPASI (Edukasi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Aset Untuk Pondok Kolaborasi).

7. Menyusun dan menyampaikan laporan implementasi atas proposal proyek perubahan, yang secara ringkas melaporkan Program edukasi yang direncanakan dalam proposal telah berhasil dilaksanakan dengan baik, meskipun pembangunan pondok kolaborasi masih dalam proses. Edukasi dilakukan di Bali dan Nusa Tenggara melalui tatap muka dan dialog, bertujuan memperkenalkan fungsi Kementerian Keuangan serta menunjukkan komitmen pada integritas dan budaya anti-korupsi. Kegiatan dilakukan sebagai bagian dari Sinergi Kemenkeu Satu Bali dengan melibatkan juga SMV Kemenkeu, seperti LPEI dan PT PII. Edukasi diberikan kepada petani benur dan UMKM sekitar, dengan metode pelatihan profesional untuk CPNE dan pelatihan guru. Kegiatan Duta Transformasi ini terus berlanjut dan diharapkan menjadi sarana komunikasi efektif bagi pemerintah untuk menyampaikan program-program kerja pemerintah.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berbagai program/kegiatan dalam pelaksanaan tugas Duta Transformasi tidak menggunakan sumber daya anggaran unit kerja, tidak terdapat alokasi anggaran tersendiri yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan duta transformasi, sehingga terjadi efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan penyelesaian program kerja duta transformasi diantaranya adalah:

1. Peningkatan Indeks Kepuasan Pelayanan.
Indeks kepuasan pelayanan dari target 3,51 berhasil direalisasikan dengan nilai 3,586, yang menunjukkan bahwa layanan yang diberikan lebih dari memadai dan memenuhi ekspektasi masyarakat serta *stakeholder* terkait.
2. Peningkatan Jumlah Persetujuan Pemanfaatan BMN.
Jumlah persetujuan pemanfaatan BMN meningkat signifikan dari 90 menjadi 124 persetujuan. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan aset negara semakin efisien dan mendapatkan respon positif dari pihak terkait.
3. Peningkatan Pemahaman tentang Integritas dan Anti-Korupsi
Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terdapat peningkatan skor pemahaman tentang integritas dan anti-korupsi. Sebelum pelatihan, peserta mendapatkan skor 58/100, dan setelah pelatihan skor meningkat menjadi 71/100. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan dalam program edukasi yang menekankan pada pentingnya nilai-nilai integritas dalam pengelolaan aset negara dan kegiatan ekonomi.

4. Pelatihan UMKM dan Edukasi Integritas

Pelatihan yang diselenggarakan untuk UMKM memberikan manfaat berupa pemahaman tentang pentingnya integritas dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan usaha mereka. Selain itu, pelatihan juga memberikan keterampilan baru yang bisa diterapkan dalam meningkatkan daya saing UMKM. Bersama LPEI telah dilakukan pendampingan kegiatan uji coba pengolahan bandeng menjadi produk premium, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai jual produk lokal dan membuka pasar baru. Program ini menunjukkan potensi untuk mengembangkan produk unggulan yang dapat memberikan dampak positif pada perekonomian lokal. Selain itu dilakukan pula rebranding menjadi ikan bandeng dengan nama White Salmon. Rebranding yang merupakan ide dari kelompok UMKM Petani nenet ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan citra produk, tetapi juga membuka peluang untuk memperluas pangsa pasar, yang berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.

5. Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Aset

Program konsultasi dan bimbingan teknis pemanfaatan aset telah membantu masyarakat dan UMKM dalam memahami cara memanfaatkan aset negara secara efektif. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai upaya untuk memastikan bahwa aset negara digunakan secara optimal dan menguntungkan.

6. Sosialisasi Pemanfaatan Aset Negara

Sosialisasi yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana cara memanfaatkan aset negara untuk tujuan yang produktif. Ini juga menciptakan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan aset yang lebih transparan dan efisien.

7. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Bali

Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten/Kota memperlancar jalannya program, memastikan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah, serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang lebih terintegrasi.

Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam pencapaian tujuan program, meskipun ada kendala pada pembentukan badan hukum UMKM / Koperasi Multi Pihak yang mempengaruhi keterlambatan pengajuan permohonan persetujuan pemanfaatan aset eks KPPBC TMP A Denpasar di Desa Patas. Namun, hal ini tidak menghambat keberhasilan program secara keseluruhan, dan pelaksanaan edukasi serta kegiatan lainnya tetap menunjukkan hasil yang positif.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu program kerja duta transformasi tidak berjalan, yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 11. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko diantaranya dengan:

1. Melakukan program kerja bayangan (mengikuti program kerja tahun 2023).
2. Melakukan koordinasi dengan calon *lighthouse* dari Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang diusulkan untuk tim duta transformasi 2024.
3. Melakukan koordinasi awal dengan beberapa *stakeholder* untuk mendukung program kerja duta transformasi 2024.

Dengan demikian diproyeksikan risiko tersebut akan menjadi rendah pada level 10.

Khusus terkait program Kerja Proyek Perubahan (C1-3), sebagai upaya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif, dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek, kami melakukan mitigasi resiko dengan cara untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko proyek.

Adapun hasil dari analisa risiko kami berikut rencana tindak lanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Aspek	Skenario yang Mungkin Terjadi	Tipe Risiko	Rencana Tindak Lanjut
Kesediaan dana persiapan proyek	Dana persiapan tidak tersedia atau kurang memadai pada DIPA	High	Memastikan dana persiapan tersedia DIPA pada KPPBC atau meminta kesediaan Kepala Kantor KPPBC Denpasar
Permohonan BSG	Pengguna Barang/ Sekjen menolak melakukan permohonan BSG	High	Melakukan pendekatan persuasif dan menjelaskan skema BSG kepada sekjen
Resistensi dari penduduk sekitar	Masyarakat resisten terhadap proyek sehingga melakukan perbuatan yang melanggar	Medium	Mengajak masyarakat yang resisten untuk bergabung dalam proyek sehingga turut merasakan manfaat dari proyek

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

1. Kendala jarak / lokasi *lighthouse* yang tersebar di 3 Provinsi.
2. Kendala penentuan mitra/perwakilan dari UMKM yang akan bertindak sebagai mitra inisiator untuk mengajukan permohonan pemanfaatan. Hal ini menjadi permasalahan mengingat terdapat 7 pengusaha sebagai leader bagi 2000 komunitas petani tambak. Sehingga diperlukan 1 wadah netral yang dapat mengakomodir kepentingan seluruh UMKM dengan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah – langkah, yaitu:

1. Permasalahan jarak diatasi dengan komunikasi melalui MS Teams, pengerjaan proyek dengan memanfaatkan tools *collabulator* salah satunya *share point*. Sehingga kelemahan ini justru diubah menjadi kekuatan tim, karena dengan tersebarnya *lighthouse* pelaksanaan edukasi dapat menjangkau lebih banyak tempat.
2. Terkait permasalahan mitra diputuskan dengan pembentukan Koperasi Multi Pihak, keunggulan bentuk koperasi adalah kedepan akan dapat dilakukan pengembangan jumlah anggota dan diservikasi usaha sehingga sekaligus sebagai upaya mitigasi risiko usaha kedepan dan sekaligus dapat merangkul lebih banyak UMKM kembali.

Rencana aksi ke depan

Guna keberlanjutan program, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Keberlanjutan Proyek
Keberlanjutan dari proyek ini akan dicapai dengan secara konsisten melakukan pendampingan pada komunitas desa devisa. Pendampingan ini bertujuan untuk memperluas keberadaan desa devisa dengan mengajukan usulan proposal kolaborasi pada LPEI untuk pembentukan desa devisa baru.
2. Pengajuan Desa Devisa
Tahun ini, telah diajukan dua desa di Bali sebagai cluster devisa kerajinan tangan, dan satu desa devisa di Provinsi NTB untuk menampung petani cabe. Ini merupakan langkah awal untuk memperluas program desa devisa yang dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal.
3. Perluasan Keterlibatan dalam Program Desa Devisa
Program pendampingan desa devisa saat ini diinisiasi oleh Bea Cukai dan DJKN. Kedepannya, diusulkan untuk menambah keterlibatan DJP, BDK, dan DJPB, agar edukasi yang diberikan menjadi lebih komprehensif dan dapat menjangkau lebih banyak sektor.
4. Pelaksanaan Program Emansipasi
Saat ini Progress Program Emansipasi (Edukasi Masyarakat melalui Pemanfaatan Aset untuk Pondok Kolaborasi), adalah pengajuan permohonan pemanfaatan BMN dengan skeman BSG dari Sesditjen Bea Cukai ke Sekjen Kemenkeu. Untuk itu proses ini perlu untuk dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan tercapainya program.
5. Pelaksanaan Program Edukasi Masyarakat
Edukasi masyarakat baik terkait program Kemenkeu, diseminasi layanan SMV dan program antikorupsi akan dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Kemenkeu Satu dan *stakeholder* baik melalui program DJKN *Goes to School*, Kemenkeu Mengajar, dan pengembangan

program desa devisa dengan memadukan dengan program desa anti korupsi berkolaborasi dengan Forum Paksi Bali dan Paksi Dana Raksa Perwakilan Bali.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat serta mendukung pengembangan ekonomi desa devisa dan edukasi masyarakat sebagai sarana komunikasi program-program Pemerintah.

8. Sasaran Strategis: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Penguatan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kemenkeu telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mengidentifikasi 2 indikator kinerja yaitu:

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
SS: Pengelolaan keuangan yang akuntabel				120%
8a-CP	Indeks kinerja anggaran	100	120	120%
8b-N	Persentase deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%	0%	120%

Uraian mengenai indikator kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. (8a-CP) Indeks Kinerja Anggaran

Ruang lingkup perhitungan Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 63 Tahun 2023 pasal 249 ayat 7 dengan rumus sebagai berikut :

- Triwulan I (Q1) / Triwulan II (Q2) = IKPA/95,00
- Triwulan III (Q3) = $100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15$ ($95 < x < 98$)
- Triwulan IV (Q4) = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan target NKA sebesar 91,00

Adapun *trajectory* indikator kinerja indeks kinerja anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 8: Pengelolaan keuangan yang akuntabel (8a-CP) Indeks kinerja anggaran								
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	100	Max/ Avg
Realisasi	120	102.87	102,87	101,11	101,11	120	120	120	
Capaian	120%	102.87%	102,87%	101,11%	101,11%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	102.87%	102,87%	101,11%	101,11%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	-	-	-	-	120
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator Tingkat Kualitas Pelaksanaan Anggaran telah dilakukan *extra effort* berupa melakukan pendampingan dan monitoring kepada setiap bidang / bagian umum dalam melakukan realisasi anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana dan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana tugas. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memenuhi target penyerapan anggaran dan mengurangi deviasi antara rencana penarikan dana dan rencana pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh pada pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pembentukan Tim Pengelola Keuangan yang telah dilakukan di awal tahun.
2. Penyusunan rencana penarikan dana dan rencana pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan melakukan revisi anggaran apabila terdapat perubahan anggaran dan kegiatan.
3. Adanya peranan pimpinan dalam melakukan monitoring pencapaian kualitas pelaksanaan anggaran.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian indikator kinerja indeks kinerja anggaran pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara tidak menggunakan sumber dana tertentu dalam anggaran unit kerja, dimana pelaksanaan kegiatan-kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan tusi, sehingga secara umum terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang kualitas pelaksanaan anggaran diantaranya adalah:

1. Penyusunan Rencana Penarikan Dana dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan secara berkala.
2. Pelaksanaan realisasi belanja modal pada triwulan I sehingga dapat menunjang tugas dan fungsi organisasi.
3. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu adanya perubahan kebijakan dan struktur anggaran (penambahan/pengurangan), yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 9. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko diantaranya dengan Pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa yang akuntabilitas serta penyusunan rencana penarikan dana triwulanan. Dengan demikian diproyeksikan ketiga risiko tersebut akan menjadi rendah pada level 8.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

1. Kurangnya penyerapan anggaran pada semester 1 karena terjadi penumpukan penyerapan pada akhir tahun.
2. Besarnya deviasi antara rencana penarikan dana dan rencana pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah – langkah, yaitu:

1. Melakukan perencanaan kegiatan lebih awal.
2. Adanya monitoring terkait dengan penyerapan anggaran dan melakukan lebih cermat latas

penyusunan rencana penarikan dana dan rencana pelaksanaan kegiatan.

Rencana aksi ke depan

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Menyampaikan informasi terkait realisasi anggaran kepada setiap bidang / bagian umum sehingga dapat dilakukan perencanaan anggaran dan kegiatan secara akurat.
2. Mendorong peningkatan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk mengurangi uang tunai pada bendahara.

b. (8b-N) Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP: 425785.

Target Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN adalah 10% dihitung dari:

1. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
2. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
3. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425783 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Ketentuan tambahan:

1. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan periode penyetoran oleh Satker dengan periode pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi (Contoh: PNBP disetor dan dicatat oleh Satker pada tanggal 30 Juni namun tercatat di OMSPAN pada tanggal 01 Juli)
2. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan lot penyetoran oleh Satker dengan pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: a. PNBP disetor dalam satu NTPN untuk beberapa Risalah Lelang/Debitur; b. PNBP disetor dalam beberapa NTPN untuk satu Risalah Lelang)
3. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan kurs pada penyetoran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: Piutang dalam bentuk Mata Uang Asing saat penyetoran PNBP Biad PPN antara data OMSPAN dengan data FocusPN)

Formula Deviasi PNBP Kanwil dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rata-rata Deviasi = ((Capaian Deviasi KPKNL A + Capaian Deviasi KPKNL B + dst) + (Capaian Deviasi PL II)) / (Jumlah KPKNL + 1)

Adapun *trajectory* indikator kinerja Persentase deviasi data PNBP fungsional DJKN tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 8: Pengelolaan keuangan yang akuntabel (8b-N) Persentase Deviasi data PNBP Fungsional DJKN								
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Min/Avg
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	10%	-	-	-	-	0%
2023	15%	-	-	-	-	0%
2022	10%	-	-	-	-	1,91%
2021	12,5%	-	-	-	-	3%
2020	-	-	-	-	-	-

Tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase deviasi data PNBP fungsional DJKN tahun 2024, telah dilakukan *extra effort* yaitu:

1. Memastikan akurasi pembukuan PNBP MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
2. Memastikan akurasi pembukuan PNBP MAP 425783 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi penginputan aplikasi Dropbox pada 5 KPKNL maupun 14 orang

Pejabat Lelang kelas II binaan Kanwil DJKN Bali Nusra.

2. Penarikan data OMSPAN setiap awal bulan pada akun KPKNL, PL II maupun Pegadaian kemudian melakukan *sharing* data tersebut agar menjadi acuan angka PNBP sebelum dilaksanakan Rekonsiliasi.
3. Koordinasi dengan para PIC Dropbox melalui WAG.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai indikator kinerja ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Sosialisasi / Edukasi dibidang lelang	24,685,000	23,209,400	Kegiatan berupa: 1. Bimtek/Sosialisasi/FGD di Bidang Lelang Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang 2. Telah terselenggara 2 kali kegiatan Sosialisasi dengan mengundang seluruh Pelelang lingkup Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara
2.	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta tindak lanjut atas Pelaksanaan Lelang	86,172,000	84,683,482	Kegiatan pemeriksaan Minuta dengan Output LHP, BAP dan KKP yang dilaksanakan tahun 2024, dengan rincian yaitu: 1. KPKNL Denpasar periode Minuta Semester 2 Tahun 2021 s.d Tahun 2023 2. KPKNL Bima periode Minuta tahun 2022 dan 2023 3. KPKNL Mataram periode minuta tahun 2022 dan 2023 4. KPKNL Kupang periode minuta Semester 2 Tahun 2022 s.d Tahun 2023 5. KPKNL Singaraja periode pemeriksaan minuta Semester 2 Tahun 2021 s.d Tahun 2023
3	Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	100.000.000	99,339,248	Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang
4	Penggalian Potensi Lelang	100.000.000	86.059.384	Penggalian potensi lelang pada <i>stakeholder</i> (KPKNL, Balai Lelang dan PL 2), perbankan maupun UMKM
5	Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	13,408,000	6,680,000	Pemberian rekomendasi/perizinan Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II

*penggunaan anggaran ini juga berkaitan dengan indikator kinerja yang lain

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja persentase deviasi data PNBP

fungsional DJKN diantaranya adalah:

1. Koordinasi intens pada WAG PIC Dropbox dan WAG Pejabat Lelang Kelas II.
2. Koordinasi dengan para pelelang di KPKNL serta Sub Bagian Umum KPKNL (karena pengadministrasian lelang di KPKNL saat ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum).
3. Koordinasi dengan Kantor Pusat apabila terjadi selisih sebelum data akurasi final diumumkan (sebelum tanggal 15) sehingga dapat segera melakukan perbaikan.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu adanya perbedaan data pada dropbox lelang dengan OMSPAN, yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 6. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko diantaranya dengan pemantauan dan penggalan potensi lelang kepada pihak perbankan serta melakukan rekonsiliasi dan/atau monitoring secara rutin. Dengan demikian diproyeksikan ketiga risiko tersebut akan menjadi rendah pada level 5.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, masalah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu kedisiplinan PIC data dropbox untuk menginput data realisasi lelang secara berkala. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan langkah-langkah yaitu:

1. Monitoring dan evaluasi data dropbox dari KPKNL dan Pejabat Lelang kelas II.
2. Memastikan rekonsiliasi data dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi apabila ada perbedaan data.

Rencana aksi ke depan

Guna terus mewujudkan data PNBPN fungsional DJKN yang akurat, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Pemanfaatan portal lelang V2.
2. Melakukan rekonsiliasi data secara rutin.

9. Sasaran Strategis: Komunikasi Publik yang Efektif

Layanan Informasi Publik diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK No. 129/PMK,01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Layanan informasi yang andal adalah pemberian layanan informasi bagi *stakeholder* dengan penyediaan kualitas informasi yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta bebas dari pengertian yang menyesatkan. Layanan informasi yang tepat waktu adalah pemberian layanan informasi bagi *stakeholder* sesuai dengan *service level agreement* yang disepakati sebagai komitmen layanan untuk *stakeholder*.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mengidentifikasi 2 indikator kinerja yaitu:

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
SS: Komunikasi publik yang efektif				120%
9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	5,23	120%
9b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	100	120%

Uraian mengenai indikator kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. (9a-CP) Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Seluruh Unit Eselon I di Kementerian Keuangan diberikan mandat agar dapat mengukur efektivitas komunikasi publik yang dilakukan melalui indikator kinerja Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan atau di kenal dengan indikator kinerja VIKOM. Indikator kinerja ini kemudian menjadi tanggung jawab dari unit kehumasan di masing masing unit eselon I. Untuk DJKN indikator kinerja VIKOM ini menjadi tanggung jawab Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat dan juga 17 unit Kantor Wilayah DJKN.

Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan, yang baru menjadi indikator kinerja pada tahun 2024 ini, terdiri atas unsur:

- a) Capaian efektivitas komunikasi publik
- b) Partisipasi agenda setting
- c) *Employee Advocacy*
- d) Capaian penguatan hubungan kelembagaan negara dan/atau masyarakat.

Realisasi indikator kinerja indeks efektivitas ekosistem kehumasan didapatkan dari Kantor Pusat DJKN. Adapun *trajectory* indikator kinerja indeks efektivitas ekosistem kehumasan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 9: Komunikasi Publik yang Efektif (9a-CP) Indeks efektivitas ekosistem kehumasan								
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	Max/ TLK
Realisasi	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	
Capaian	147,32%	147,32%	147,32%	147,32%	147,32%	147,32%	147,32%	147,32%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	3,55	-	-	-	-	5,23
2023	-	-	-	3,55*	-	-
2022	-	-	-	3,5*	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

*sumber: LAKIN DJKN 2023

Tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks efektivitas ekosistem kehumasan tahun 2024, telah dilakukan *extra effort* berupa pendampingan dan monitoring partisipasi KPKNL

pada Agenda Setting yang telah ditetapkan dan partisipasi pegawai di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara untuk pelaksanaan *Employee Advocacy*. Selain itu, juga dilaksanakan pembinaan secara langsung oleh Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi kepada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Penunjukan Anggota Tim *Employee Advocacy* yang telah dilakukan di awal tahun.
2. Pelaksanaan monitoring dan pendampingan baik dalam pelaksanaan Agenda Setting maupun *Employee Advocacy*.
3. Pembinaan secara langsung oleh Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi kepada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai indikator kinerja ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik*	26.916.000	26.108.600	Telah dilaksanakan: 1.Pembinaan kepada Seksi HI di KPKNL terkait pengelolaan kehumasan dan layanan informasi publik. 2.Kegiatan DJKN <i>Goes To Campus</i> dalam rangka fungsi kehumasan dengan publikasi tugas dan fungsi Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara; 3.Kegiatan Aset Talk dalam rangka fungsi kehumasan dengan publikasi tugas dan fungsi Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara; 4.Liputan kegiatan pimpinan maupun produksi konten dalam rangka meningkatkan engagement media sosial Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

*penggunaan anggaran ini juga berkaitan dengan indikator kinerja yang lain

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan efektivitas ekosistem kehumasan diantaranya adalah:

1. Kegiatan DJKN *Goes to Campus*
2. Kegiatan Aset Talk
3. Publikasi konten lainnya pada media sosial, *website* maupun kanal Youtube Kanwil DJKN

Bali dan Nusa Tenggara untuk menaikkan *engagement*.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu berita maupun informasi yang disampaikan tidak tepat sasaran, yang dipetakan pada awal tahun beradap pada level 6. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko diantaranya dengan meningkatkan dokumentasi dan publikasi kegiatan yang dilaksanakan pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, serta informasi lainnya terkait tugas dan fungsi Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Dengan demikian diproyeksikan risiko akan menjadi rendah pada level 5.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

1. Kurangnya sumber daya manusia yang mengelola kehumasan unit kerja secara khusus dibandingkan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan.
2. Kurangnya kemampuan maupun keterampilan pegawai dalam produksi kehumasan yang berkualitas.
3. Keterbatasan sarana untuk mendukung produksi kehumasan yang berkualitas.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah – langkah, yaitu:

1. Menghimbau pegawai terkait untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait kehumasan.
2. Mengajukan permohonan pengadaan sarana pendukung produksi kehumasan.
3. Membentuk tim kerja produksi kehumasan lintas seksi maupun bidang.

Rencana aksi ke depan

Guna menjaga indeks efektivitas ekosistem kehumasan yang bernilai tinggi, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai dalam bidang kehumasan.
2. Mengoptimalkan peran pegawai lintas seksi maupun bidang untuk mendukung produksi kehumasan yang berkualitas dengan menetapkan Tim Pengelola Akun Media Sosial.
3. Kolaborasi dengan kehumasan lintas Eselon I pada Kementerian Keuangan Provinsi Bali dan Nusa Tenggara.

b. (9b-N) Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022.

Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing *website* untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Adapun *trajectory* indikator kinerja Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 9: Komunikasi Publik yang Efektif (9b-N) Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							Pol/KP
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	110	110	110	110	110	110	100	
Capaian	137,5%	137,5%	137,5%	137,5%	137,5%	137,5%	125,0%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	80	-	-	-	-	100
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Tidak terdapat target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Sehingga dalam narasi Laporan Kinerja tidak dapat diperbandingkan dengan target - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu.

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) tahun 2024, telah dilakukan *extra effort* berupa pendampingan dan monitoring pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi Publik pada KPKNL. Selain itu, juga dilaksanakan *update* informasi pada *website* Kanwil dan monitoring *update* informasi pada *website* KPKNL.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Penunjukan Anggota Tim Pengelola Layanan Informasi Publik (PPID) baik pada Kanwil maupun KPKNL yang telah dilakukan di awal tahun.
2. Pelaksanaan monitoring dan pendampingan baik dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik maupun *update* informasi pada *website* Kanwil dan KPKNL.
3. Pembinaan secara langsung oleh Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi kepada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai indikator kinerja ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik*	26.916.000	26.108.600	Telah dilaksanakan: 1.Pembinaan kepada Seksi HI di KPKNL terkait pengelolaan layanan informasi publik. 2.Kegiatan DJKN <i>Goes To Campus</i> dalam rangka publikasi layanan informasi publik pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara 3.Kegiatan Aset Talk dalam rangka publikasi layanan informasi publik pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. 4. <i>Upload</i> dan <i>update</i> data informasi publik pada <i>website</i> Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

*penggunaan anggaran ini juga berkaitan dengan indikator kinerja yang lain

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) diantaranya adalah:

1. Kegiatan DJKN *Goes To Campus*

2. Kegiatan Aset Talk
3. Publikasi konten pada media sosial, *website* maupun kanal Youtube Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara untuk menyebarkan terkait layanan informasi pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dan KPKNL di bawahnya.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu ketidakpuasan pengguna terkait layanan informasi yang diberikan, yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 11. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko di antaranya dengan mempublikasikan informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dengan demikian diproyeksikan risiko akan menjadi rendah pada level 10.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

1. Kurangnya sumber daya manusia yang mengelola layanan informasi publik pada unit kerja secara khusus dibandingkan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan.
2. Informasi yang disampaikan tidak ter-*update*.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah – langkah, yaitu:

1. Menetapkan tim pengelolaan layanan informasi publik dengan melibatkan seluruh bidang dan bagian pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara..
2. Melakukan *update* informasi secara berkala pada *website* Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara secara sistematis.

Rencana aksi ke depan

Guna menjaga indeks Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) yang bernilai tinggi, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Mengoptimalkan peran pegawai lintas seksi maupun bidang pada Tim Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID).
2. Senantiasa memperbarui pengetahuan maupun informasi terkait layanan, maupun peraturan perundangan yang berlaku.
3. Melaksanakan *update* informasi pada *website* media sosial Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

10. Sasaran Strategis: Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mengidentifikasi 2 indikator kinerja yaitu:

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
SS: Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah				118,50%
10a-N	Indeks efektivitas UKI	82	95,94	117%
10b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu)	100	120	120%

Uraian mengenai indikator kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. (10a-N) Indeks Efektivitas UKI

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas Unit Kepatuhan Internal (UKI) yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian internal di lingkungan Kementerian Keuangan. Indeks efektivitas UKI diukur dengan skala 1 s.d. 100, dan menggunakan 3 komponen sebagai berikut:

a. Komponen Pengungkit (Bobot 15%)

1. Komitmen Pimpinan (5%)

Subkomponen ini mengukur komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas UKI.

2. Dukungan Sumber Daya Manusia (5%)

Subkomponen ini mengukur kecukupan jumlah dan kompetensi SDM UKI

3. Akses Data dan Informasi (2,5%)

Subkomponen ini mengukur akses UKI atas data & informasi terkait proses bisnis yang dipantau.

4. Komunikasi (2,5%)

Subkomponen ini mengukur pelaksanaan komunikasi UKI dengan pimpinan & pegawai di unit kerjanya, dengan UKI di tingkat atasnya, maupun dengan Itjen (Auditor Mitra/Tim

Pembina UKI)

b. Komponen Proses (35%)

1. Penyusunan FRS (4%)

Subkomponen ini mengukur potensi tindakan Fraud dalam organisasi.

2. Profiling Pegawai (4%)

Subkomponen ini mengukur kesesuaian penyusunan profil pegawai telah sesuai standar (disiplin jam kerja, disiplin selain jam kerja, hasil pemantauan perilaku dan kode etik, gaya hidup, analisis harta kekayaan, dan informasi lain.

3. Penyusunan Program Kerja (3%)

Subkomponen ini mengukur program kerja yang disusun oleh UKI dalam rangka pemantauan.

4. Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern (17%)

Subkomponen ini memperhitungkan EPITE (Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas).

5. Penarikan Simpulan Pengendalian Internal (3%)

Subkomponen ini mengukur penarikan simpulan efektivitas pengendalian intern dari hasil pemantauan pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI.

6. Pelaporan Pemantauan Pengendalian Internal (4%)

Subkomponen ini mengukur proses penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh UKI.

c. Komponen Hasil (Bobot 50%)

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat (15%)

Subkomponen ini mengukur efektivitas penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan integritas dan perilaku pegawai (fraud dan non fraud) yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil verifikasi, serta penyelesaian pengaduan yang dilimpahkan oleh Inspektorat Jenderal

2. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi (15%)

Subkomponen ini mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan

3. Kejadian Tangkap Tangan dan/atau Kasus Korupsi (20%)

Subkomponen ini mengukur kontribusi UKI atas kejadian tangkap tangan dan/atau terjerat kasus korupsi baik dari APH (Aparat Penegak Hukum) IBI, dan investigasi internal lainnya.

Adapun *trajectory* indikator kinerja Indeks efektifitas UKI tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 10: Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah (10a-N) Indeks efektifitas UKI							
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	5	15	15	20	20	82	82	Max/TLK
Realisasi	5	15	15	20	20	95,94	95,94	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	117%	117%	
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	117%	117%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	82	-	-	-	-	95,94
2023	-	-	-	80*	-	-
2022	-	-	-	75*	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

*sumber: LAKIN DJKN 2023

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks integritas tahun 2024, telah dilakukan *extra effort* berupa pembentukan channel pada aplikasi Ms Teams. Channel Ms Teams ini bermanfaat sebagai sarana koordinasi dokumentasi kegiatan pembangunan integritas dan pelaksanaan tugas kepatuhan internal lainnya di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dan KPKNL yang ada dibawah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melaksanakan rangkaian kegiatan Kepatuhan Internal, meliputi pemantauan kode etik, Pengendalian Utama sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelaporan Unit Kepatuhan Internal

tingkat III.

- Monitoring evaluasi ketepatan waktu dan kelengkapan kertas kerja indeks penilaian efektivitas UKI.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai indikator kinerja ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Implementasi Pengendalian dan Kepatuhan Internal	Rp22.848.000,00	Rp18.885.963,00	<ol style="list-style-type: none"> Telah dilakukan pembinaan ke KPKNL yang berada di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara. Telah menyusun dan menyampaikan laporan capaian kinerja, laporan LHPPU bulanan, laporan benturan kepentingan, laporan pengaduan, laporan pengendalian gratifikasi, laporan kode etik, laporan Fraud Risk Scenario (FRS), laporan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK), dan laporan profiling pegawai. Telah melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko tiap triwulan pada tahun 2024.

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja indeks efektivitas UKI diantaranya adalah pelaksanaan pembinaan kepada Unit Kepatuhan Internal tingkat III serta monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan perangkat pemantauan sebagaimana ditetapkan kantor pusat DJKN.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu pelaksanaan pemantauan penerapan Sistem Pengendalian Intern tidak sesuai dengan KMK-477/KMK.09/2021 dan arahan lainnya yang telah diterapkan, yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 13. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko diantaranya dengan monitoring secara berkala pelaksanaan pemantauan penerapan sistem pengendalian intern. Dengan demikian diproyeksikan risiko akan menjadi rendah pada level 11.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu adanya mutasi pegawai dan pegawai yang menggantikan tidak memiliki kompetensi dan pengalaman dalam melaksanakan tugas unit kepatuhan internal. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan langkah – langkah, yaitu melakukan peningkatan kompetensi pegawai pada unit kepatuhan internal melalui coaching dari atasan langsung, *e-learning* dan pelatihan jarak jauh, serta penyediaan dokumen - dokumen terkait unit kepatuhan internal pada Ms Teams sebagai referensi.

Rencana aksi ke depan

Guna mempertahankan capaian kinerja indeks efektifitas UKI, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelaporan Unit Kepatuhan Internal tingkat III.
2. Melakukan pembinaan kepada Unit Kepatuhan Internal tingkat III.

b. (10b-N) Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu)

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 2,50.
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut:

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub

komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75.

- Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB 90 Tahun 2021 dan KMK 62 Tahun 2023, Tim Penilai diharapkan melalui pemantauan dan evaluasi terkait keberlanjutan pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM bagi unit kerja yang telah berpredikat paling sedikit sekali dalam dua tahun.

Pada tahun 2024, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mengikuti pemantauan dan evaluasi keberlanjutan atas predikat ZI-WBK yang dilakukan oleh Tim Penilai dari Unit Eselon I DJKN, dan telah dinyatakan lolos, sesuai nota dinas Sekretaris DJKN nomor ND-4317/KN.1/2024 tanggal 22 November 2024.

Adapun *trajectory* indikator kinerja tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Balinusra	SS 10: Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah (10b-N) Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu)								
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	100	120	120	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%	
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	-	-	-	-	120
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu) tahun 2024, telah dilakukan *extra effort* berupa pendampingan dan monitoring pengisian lembar kerja evaluasi pada aplikasi DIA-KEMENKEU kepada tiap area/bidang. Pendampingan dan monitoring ini dimaksudkan agar dokumen yang diunggah sesuai dengan yang diminta pada tiap uraian pertanyaan serta tidak ada dokumen yang terlewat.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Target indikator kinerja ini berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pembentukan Tim Pembangunan ZI-WBK/WBBM yang telah dilakukan di awal tahun.
2. Penyusunan rencana kerja tiap area/bidang sesuai dengan lembar kerja evaluasi ZI-WBK/WBBM.
3. Adanya agen perubahan yang ditunjuk untuk mendorong pembangunan ZI-WBK/WBBM.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pelaksanaan pembangunan keberlanjutan ZI-WBK pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara tidak menggunakan sumber dana tertentu dalam anggaran unit kerja, dimana pelaksanaan kegiatan-kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan tuisi, sehingga secara umum terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pembangunan ZI-WBK/WBBM diantaranya adalah:

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI-WBK/WBBM secara berkala.
2. Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Penilaian Pembangunan dan Monev ZI-WBK/WBBM.
3. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan secara triwulanan.
4. Kegiatan – kegiatan lain yang dilakukan oleh Seksi Kepatuhan Internal yang berdampak pada peningkatan integritas pegawai, seperti:
 - a. Integrity *sharing* dengan narasumber Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.
 - b. Sosialisasi nilai – nilai integritas, anti korupsi, serta tolak dan lapor gratifikasi kepada pihak internal maupun eksternal melalui *website*, media sosial, *running text*, banner, TV APT, dan dalam kegiatan tatap muka, baik oleh pimpinan unit maupun oleh penyuluh anti korupsi pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.
 - c. Pembinaan kepatuhan internal dan manajemen risiko kepada KPKNL.

Analisis atas mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Terhadap pencapaian indikator kinerja ini terdapat risiko yaitu program keberlanjutan Zona Integritas WBK tidak berjalan sesuai dengan KMK-62/KM.1/2023 dan Peraturan Lainnya, yang dipetakan pada awal tahun berada pada level 23. Terhadap risiko dimaksud, telah dilakukan mitigasi risiko diantaranya dengan koordinasi pelaksanaan Pembangunan keberlanjutan oleh seluruh jajaran pegawai serta monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan Pembangunan keberlanjutan ZI-WBK sesuai KMK-395/KM.1/2024 (pengganti KMK-62/KM.1/2023). Dengan demikian diproyeksikan risiko akan menjadi rendah pada level 11.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

1. Adanya rencana kerja yang tidak terlaksana akibat adanya jadwal kegiatan terkait tugas dan fungsi lainnya yang bersamaan dengan kegiatan pembangunan ZI-WBK/WBBM.
2. Adanya mutasi pejabat/pegawai yang menjadi penggerak pembangunan ZI-WBK/WBBM.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah – langkah, yaitu:

1. Penyusunan tim kerja pembangunan ZI-WBK/WBBM dengan melibatkan beberapa bidang/bagian dalam satu area
2. Adanya dokumentasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana kerja yang akan dilaksanakan, sehingga apabila ada pejabat/pegawai baru, pejabat/pegawai yang bersangkutan memiliki gambaran tentang apa yang telah dilaksanakan dan dapat meneruskan tugas sesuai perannya dalam tim pembangunan ZI-WBK/WBBM.

Rencana aksi ke depan

Guna menjaga keberlanjutan ZI-WBK dan dalam rangka mendorong pembangunan ZI-WBBM, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan simplifikasi inovasi dengan menghilangkan atau memperbaiki inovasi yang saat ini tidak bernilai tambah dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM.
2. Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM.

B. Kinerja Lainnya

1. Penghargaan yang diterima dari institusi/lembaga di luar Kementerian Keuangan

Pada tahun 2024, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mendapatkan penghargaan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Mahkamah Agung Republik Indonesia atas kerja sama dan peran sertanya dalam proses peralihan hak atas tanah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Keuangan RI kepada Mahkamah Agung RI yang terletak di Jalan A. Yani Utara, Kelurahan Peguyangan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, seluas 4.700 m², untuk pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bali.

Piagam Penghargaan yang Diterima oleh Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara



2. Inovasi Pojok SMV pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara

Sesuai dengan KEP-20/KN/2024 Tentang Pembentukan Tim Koordinator Pojok Special Mission Vehicle (SMV) dan Penunjukan Special Mission Vehicle (SMV) Icon Tahun 2024, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam rangka mempercepat diseminasi informasi terkait produk/layanan masing-masing BUMN/Lembaga di bawah Pembinaan dan Pengawasan Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, dan menunjang pelaksanaan mandat SMV Kementerian Keuangan, serta sebagai bentuk dukungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada program Regional Chief Economist (RCE) yang diusung oleh Kementerian Keuangan, perlu dilakukan koordinasi antara kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan SMV Kementerian Keuangan

Dalam rangka membentuk ruang komunikasi antara SMV dan *stakeholder* di daerah melalui representasi Kantor Wilayah telah diluncurkan Pojok SMV dan telah ditunjuk perwakilan pada masing-masing Kantor Wilayah DJKN dan pada beberapa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang sebagai SMV Icon. Salah satu Kantor Wilayah DJKN yang ditunjuk perwakilan sebagai SMV Icon adalah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara selaku representasi dari Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara.

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu mengikuti rangkaian SMV sebagai berikut:

- a. Market Sounding PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, atas proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Revitalisasi dan Pengembangan Alat Penerangan Jalan kota Denpasar.
- b. Kick Off Meeting pada tanggal 25 April 2024 sesuai Undangan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan nomor UND-141/KN.3/2024.
- c. SMV Talk Seri 1 pada tanggal 16 Mei 2024 sesuai Undangan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan nomor UND-179/KN.3/2024.
- d. SMV Talk Seri 2-6 pada tanggal 11, 13, 19, 20 dan 25 Juni 2024 sesuai Undangan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan nomor UND-201/KN.3/2024.
- e. Webinar SMV Icon 2024: Creating a Winning Pitch pada tanggal 27 Juni 2024 sesuai Undangan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan nomor UND-223/KN.3/2024.
- f. Coaching Program For New Exporter (CPNE) pada tanggal 28-30 Agustus 2024.
- g. Bussines Matching. Ajang pengumpulan informasi tentang kebutuhan dan penawaran setiap peserta, pemetaan kepentingan mereka, dan mengatur pertemuan untuk mendiskusikan kemungkinan kerja sama. Business matching membantu meningkatkan efisiensi dalam mencari mitra bisnis yang tepat dan menghemat waktu serta biaya.
- h. Pendampingan UMKM Mitra SMV. bimbingan, pelatihan, dan dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk membantu mereka berkembang dan menjadi lebih kompetitif.
- i. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelatihan Guru Denpasar dan Tabanan bersama PT.PII.

Hasil yang Dicapai dan Kesimpulan

- a. Rangkaian kegiatan SMV Talk merupakan upaya pengenalan fungsi lima Special Mission Vehicle (SMV) yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan DJKN, antara lain: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI); PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) / PT SMI; PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/ PT PII; PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) / PT SMF; dan PT Geo Dipa Energi (Persero) / PT GDE kepada para SMV Icon
- b. Perlunya pengenalan lebih lanjut terkait program-program yang dimiliki oleh SMV dengan pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara

sehingga dapat dilakukan penggalian potensi dan implementasi program lebih lanjut.

- c. Pelaksanaan komunikasi lanjutan dan program lanjutan di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara / Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara akan dilanjutkan dalam periode selanjutnya.
- d. Pengenalan dan pelatihan calon eksportir baru terkait Strategi Marketing Ekspor, Pembiayaan Perbankan dan Pembayaran Internasional sehingga para eksportir baru dapat memulai mempersiapkan diri untuk pasar ekspor.

3. Replikasi / *benchmarking* dari instansi lain

Pada tahun 2024, tidak ada kegiatan replikasi / *benchmarking* yang bermaksud menduplikasi sistem kinerja/proses bisnis oleh instansi lain di luar Kementerian Keuangan yang dilakukan ke Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara serta tidak ada kegiatan replikasi / *benchmarking* dari instansi lain di luar Kementerian Keuangan yang bertujuan menjadikan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara sebagai referensi perbaikan proses bisnis maupun organisasi K/L dimaksud.

4. Dukungan terhadap *Gender Equality, Disability, and Sosial Inclusion* (GEDSI)

Guna menciptakan akses layanan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, tanpa membedakan gender, ramah disabilitas, serta mengurangi kesenjangan antara kelompok dan wilayah, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mengembangkan layanan WA Yakti (Layanan Informasi dan Konsultasi) di nomor 081-1380-3345, yang memadukan pemberian layanan informasi melalui *chatbot* otomatis, pendaftaran layanan konsultasi, serta menambahkan layanan pengaduan yang langsung terhubung ke Seksi Kepatuhan Internal sebagai upaya peningkatan pengawasan.

Untuk kenyamanan bagi pengguna jasa yang datang ke kantor, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dilengkapi dengan fasilitas Area Pelayanan Terpadu (APT) serta dilengkapi fasilitas penunjang pelayanan berupa ruang tunggu tamu, toilet pria dan wanita, ruang laktasi, musala, dan tempat bermain anak.

Sebagai bagian dari GKN I Denpasar, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara juga dilengkapi sarana prasarana bersama, diantaranya tenaga keamanan, pos keamanan, area parkir roda 4, area parkir roda 2, area parkir difabel, akses khusus difabel, serta APT layanan bersama khusus difabel.

Apabila ada pengguna layanan difabel yang datang ke Kanwil DJKN Balinusra, petugas APT layanan bersama akan menanyakan layanan yang akan dimohonkan, kemudian berkoordinasi dengan APT Kanwil Balinusra terkait pegawai yang menangani layanan. Selanjutnya pegawai yang menangani layanan akan menuju APT Layanan Bersama untuk memberikan layanan.

Selanjutnya, guna memudahkan pengguna jasa dan/atau mempercepat layanan kepada

stakeholder, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara juga menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Kantor Pusat DJKN diantaranya SIMAN (untuk layanan PKN), SIPP (untuk layanan penilaian), lelang.go.id (untuk layanan lelang pada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara), serta Focus PN (untuk membantu penatausahaan pengurusan piutang negara).

Fasilitas pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang Mendukung Pemberian Layanan Berdasarkan Semangat *Gender Equality, Disability, and Sosial Inclusion* (GEDSI)



C. Realisasi Anggaran

DIPA Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp3.308.580.000,00 dan direvisi menjadi Rp3.725.917.000,00 dan realisasi DIPA untuk semua jenis belanja sebesar Rp3.550.786.277,00 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp175.130.723,00.

Berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu Revisi	Realisasi	Persen
Belanja pegawai	-	-	-
Belanja barang	2.687.236.000	2.485.610.037	92,50%
Belanja modal	1.065.462.000	1.065.176.240	99,97%
Total	3.752.698.000	3.550.786.277	94,62%

Pagu dan realisasi belanja pegawai tidak ada pada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dikarenakan belanja pegawai dilakukan secara terpusat oleh Kantor Pusat DJKN / Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

Adapun anggaran lebih rinci berdasarkan RO dapat terlihat pada tabel berikut ini:

No.	Uraian RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	31,072,000	18,979,963
2.	Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	13,408,000	6,680,000
3.	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	182,964,000	152,123,506
4.	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	37,824,000	36,364,825
5.	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	24,685,000	23,209,400
6.	Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	100,000,000	99,339,248
7.	Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah	12,928,000	11,621,396
8.	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	211,137,000	202,823,736
9.	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	37,944,000	30,407,000
10.	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta tindak lanjut atas Pelaksanaan Lelang	86,172,000	84,683,482
11.	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	19,232,000	19,232,000
12.	Rekomendasi Hasil Penilaian	58,360,000	57,883,638
13.	Penggalian Potensi Lelang	100,000,000	99,038,784
14.	Aset BUN yang Dikelola	386,808,000	351,827,856
15.	Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN)	52,070,000	26,630,000
16.	Kehumasan	26,916,000	26,108,600

17.	Kerumahtangaan	121,908,000	112,321,674
18.	Layanan Bantuan Hukum	19,768,000	15,425,784
19.	Layanan Perkantoran	1,123,748,000	1,079,615,182
20.	Peralatan Fasilitas Perkantoran	423,462,000	423,176,240
21.	Kendaraan Bermotor	642,000,000	642,000,000
22.	Rekomendasi Kepatuhan Internal	40,292,000	31,893,963

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan atau Sasaran Strategis Tahun 2024. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Kantor Wilayah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang dilakukan dalam Tahun 2024 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dan telah selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Guna mengimplementasikan optimalisasi tercapainya kinerja maka peran Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dalam membangun citra baik bagi *stakeholders* sangat diharapkan.

Dalam Kontrak Kinerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara menggunakan Pengukuran kinerja dalam *BSC* merupakan penilaian terhadap Indikator Kinerja yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis (SS) dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi DJKN. Sesuai dengan Peta Strategis DJKN Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) SS dan dijabarkan kedalam 20 indikator kinerja sebagaimana yang telah tertuang dalam Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2024, capaian kinerja setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan pendekatan *BSC*, mendapatkan rata-rata tingkat pencapaian kinerja sebesar 115,49%.

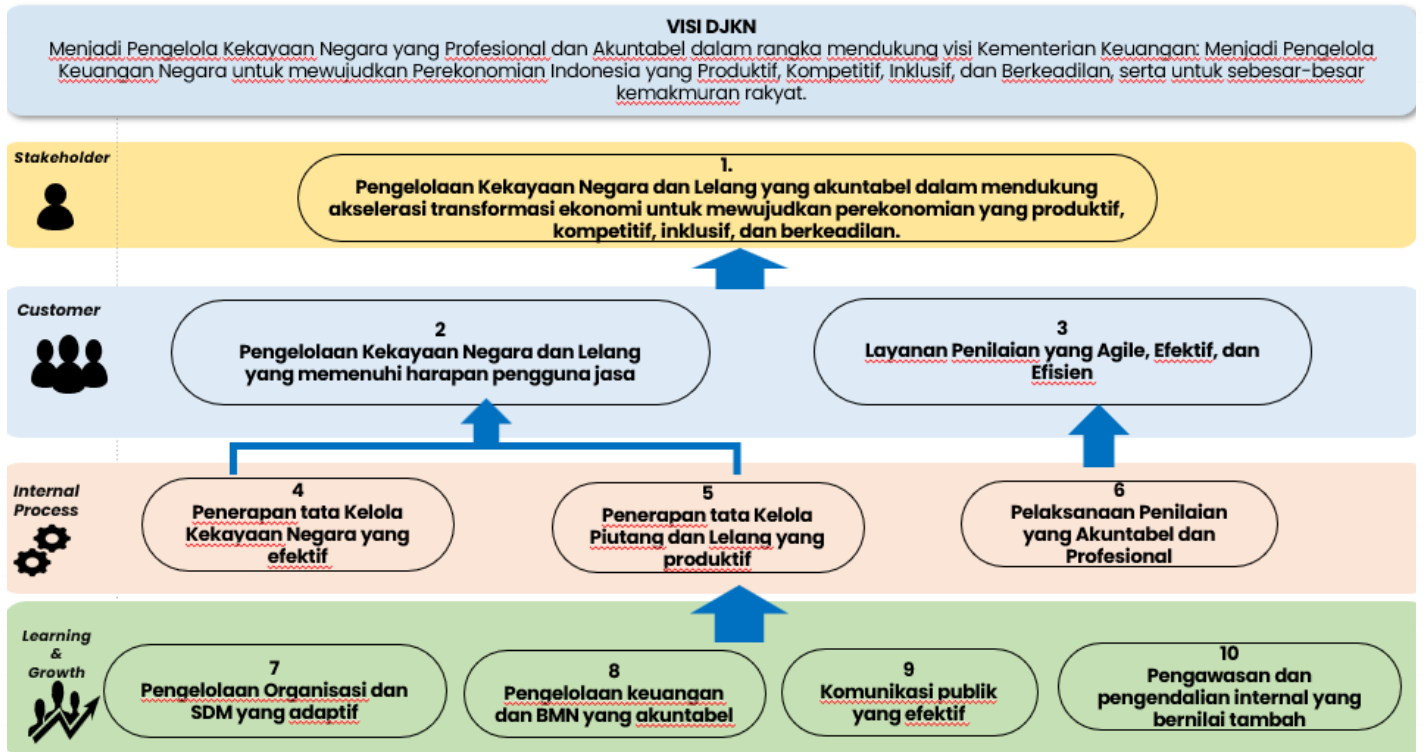
Capaian kinerja dimaksud harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, dan juga harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dan

KPKNL yang ada dibawahnya dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat melalui pemberian pelayanan yang lebih optimal.



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-26/KN/2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang 100 (Rp82.503.800.000)
		1b-CP	Indeks integritas 89,17
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan asset negara 100
		2a1-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan 71,5
		2a2-N	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN 86,5
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang 100 (Rp1.383.822.000.000)
		2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara 100 (Rp7.450.000.000)
3.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	3a-N	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian 75
4.	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan 100
		4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) 100
5.	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara 76 (1.910 BKPN)
		5b-CP	Persentase produktivitas lelang 89

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
6.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	6a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
7.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	7a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
		7b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100
		7c-N Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	75
8.	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	8a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		8b-N Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10
9.	Komunikasi Publik yang Efektif	9a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55
		9b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
10.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	10a-N Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82
		10b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan ZI-WBK/WBBM	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 95.533.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp 335.253.000
3. Pengelolaan Aset	Rp 679.712.000
4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp 13.408.000
5. Legislasi dan Litigasi	Rp 19.768.000
6. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 2.097.698.000
7. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp 26.916.000
8. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 40.292.000

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani Secara Elektronik
Sudarsono



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI
DAN NUSA TENGGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target							
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan								
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	100	100	100	100	100	100	
1b-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan asset negara	100	100	100	100	100	100	100	
	2a1-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
	2a2-N	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	86,5	86,5	86,5
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	100	100	100	100	100	
2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100	100	100	100	100	100	100	
3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien								
3a-N	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif								
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100	
4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100	
5	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Efektif								
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96	90	90	81	81	76	76	
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	89	89	

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
6a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
7a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
7b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15	40	40	75	75	100	100
7c-N	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	-	-	-	-	-	75	75
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel							
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
9	Komunikasi publik yang efektif							
9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
9b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
10	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah							
10a-N	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82
10b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara,



Ditandatangani Secara Elektronik
Sudarsono





SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Sударsono	NAMA	Rionald Silaban	
NIP	196912141996031002	NIP	196604231990101001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara	JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp82.503.800.000)	Penerima Layanan
		Indeks integritas	89,17	Penerima Layanan



2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna Jasa (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara		100%	Penerima Layanan
		Sub IKI-1	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	Penerima Layanan
		Sub IKI-2	Tingkat efektifitas pembinaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86,5	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang		100% (Rp1.383.822.000.000)	Penerima Layanan
		Persentase penurunan outstanding piutang negara		100% (Rp7.450.000.000)	Penerima Layanan
3.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian		75	Penerima Layanan
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan		100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)		100%	Proses Bisnis
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara		76% (1910 BKPN)	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang		89%	Proses Bisnis
6.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian		16%	Proses Bisnis



7.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	75%	Penguatan Internal atau Anggaran
8.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Deviasi data PNPB Fungsional DJKN	10%	Penguatan Internal atau Anggaran
9.	Komunikasi Publik yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>



PERILAKU KERJA		
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>



PERILAKU KERJA

6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Jakarta, 30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Sudarsono

196912141996031002



Ditandatangani secara elektronik

Rionald Silaban

196604231990101001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	41 pegawai								
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target							
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
1	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	
3	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Sub IKI-1	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71.5%	71,5%
	Sub IKI-2	Tingkat efektivitas pembinaan dan tindak	-	45	45	-	86,5	86,5	86,5



		lanjut persetujuan pengelolaan BMN							
4		Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6		Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	75	75	75	75	75	75
7		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
8		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
9		Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	81%	81%	76%	76%
10		Persentase produktivitas lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
11		Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
12		Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	85	85	85	85	85	85
13		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
14		Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	-	-	-	-	-	75%	75%
15		Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
16		Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
17		Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
18		Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80



19	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
20	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100

KONSEKUENSI

1. *Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2. *Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

Jakarta, 30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Sudarsono

196912141996031002



Ditandatangani secara elektronik

Rionald Silaban

196604231990101001



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-26A/KN/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-26/KN/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
			Indikator Kinerja	Target		Indikator Kinerja	Target
2.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (7,45 M)	2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (8,79 M)
8.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	8a-CP	Indeks kinerja anggaran	100

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi								
		Target							Target								
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1b-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	1b-CP	Indeks integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	-	100	100	100	100	100	100	2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100	100	100	100	100	100	100

2a1-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5	2a1-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30	50	50	60	60	71,5	71,5
2a2-N	Tingkat efektivitas pembinaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	-	45	45	-	-	86,5	86,5	2a2-N	Tingkat efektivitas pembinaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	10	45	45	60	60	86,5	86,5
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	20	40	40	60	60	100	100
7c-N	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	-	-	-	-	-	75	75	7c-N	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	5	20	20	45	45	75	75
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100	8a-CP	Indeks kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
10a-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82	10a-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	5	15	15	20	20	82	82

10b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100	10b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
-------	--	---	---	---	---	---	-----	-----	-------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Jakarta, 31 Mei 2024

Menyetujui,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara,

Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani secara elektronik
Sudarsono



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
5	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100% (7,45 M)	<i>Penerima Layanan</i>
15	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
5	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100% (8,45 M)	<i>Penerima Layanan</i>
15	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks kinerja anggaran	100	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
2	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	2	Indeks integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17

3	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5 %	71,5 %		Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30%	50%	50%	60%	60%	71,5 %	71,5 %
	Tingkat efektivitas pembinaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	-	86,5 %	86,5 %		Tingkat efektivitas pembinaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	10%	45%	45%	60%	60%	86,5 %	86,5 %
7	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100 %	100 %	7	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100 %	100 %
14	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	-	-	-	-	-	75%	75%	14	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	5%	20%	20%	45%	45%	75%	75%
15	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100	15	Indeks kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
19	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82	19	Indeks efektivitas UKI	5	15	15	20	20	82	82

20	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100 %	100 %	20	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
----	--	---	---	---	---	---	-------	-------	----	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Jakarta, 31 Mei 2024

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Sudarsono



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-26 B/KN/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-26/KN/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-26 A/KN/2024 tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja		Target	Indikator Kinerja		Target
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (8,79 M)	2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (16,813 M)
5	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	5a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	76	5a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	75

B. Perubahan Lampiran Indikator Kinerja Individu

Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Menjadi						
		Target									Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y

2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100	100	100	100	100	100	100 (8,79 M)	2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100	100	100	100	100	100	100 (16,813 M)
5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96	90	90	81	81	76	76	5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96	90	90	80	80	75	75

Jakarta, 18 September 2024

Menyetujui,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara,

Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani secara elektronik
Sudarsono



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
5	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100% (8,79 M)	<i>Penerima Layanan</i>
9	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	76%	<i>Proses Bisnis</i>
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
5	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100% (16,813 M)	<i>Penerima Layanan</i>
9	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	75%	<i>Proses Bisnis</i>

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
5	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100	100	100	100	100	100	100 (8,79 M)	5	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100	100	100	100	100	100	100 (16,813 M)
9	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96	90	90	81	81	76	76	9	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96	90	90	80	80	75	75

Jakarta, 18 September 2024

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Sudarsono



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-26 C/KN/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-26/KN/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-26 A/KN/2024 tanggal 31 Mei 2024 dan Perjanjian Kinerja Nomor PK-26 B/KN/2024 tanggal 18 September 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
			Indikator Kinerja	Target		Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100 (82,50M)	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100 (83,63M)
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (16,81M)	2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (23,28M)
5	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	5a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	75 (1.884)	5a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	75 (1.883)

Jakarta, 20 November 2024

Menyetujui,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara,

Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani secara elektronik
Sudarsono



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara tanggal 31 Mei 2024 dan 18 September 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100 (82,50 M)	<i>Penerima Layanan</i>
5	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (16,81 M)	<i>Penerima Layanan</i>
9	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	75 (1.884)	<i>Proses Bisnis</i>
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100 (83,63 M)	<i>Penerima Layanan</i>

	(Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)			
5	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (23,28 M)	<i>Penerima Layanan</i>
9	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	75 (1.883)	<i>Proses Bisnis</i>

Jakarta, 20 November 2024

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Sudarsono



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban



**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
KANWIL DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA
TAHUN 2024**

Kode	IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian (%)	Indeks Max. 120 (%)
<i>Stakeholder Perspective (30%)</i>					
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan				
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	131,06%	131,06	120,00
1b-CP	Indeks Integritas	89,17	92,44	103,67	103,67
<i>Customer Perspective (20%)</i>					
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa				
2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	146,91%	146,91	120,00
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	138,60%	138,60	120,00
2c-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%	112,77%	112,77	112,77
3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien				
3a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	106,76	142,35	120,00
<i>Internal Process Perspective (25%)</i>					
4	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif				
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	108,36%	108,36	108,36
4b-N	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	127,60%	127,60	120,00
5	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif				
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	75%	72,72%	103,04	103,04
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%	115,30%	129,55	120,00
6	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional				
6a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	0,76%	195,25	120,00
<i>Learning and Growth Perspective (25%)</i>					
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				
7a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	95,48	112,33	112,33
7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120,00	120,00
7c-N	Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi	75%	154,27%	205,69	120,00
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel				
8a-CP	Indeks kinerja anggaran	100	120	120,00	120,00
8b-N	Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN	10%	0%	200,00	120,00
9	Komunikasi publik yang efektif				
9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	5,23	147,32	120,00
9b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	100	125,00	120,00
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah				
10a-N	Indeks efektivitas UKI	82	95,94	117,00	117,00
10b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu)	100	120	120,00	120,00

Jumlah anggaran tahun 2024 = Rp3.725.917.000,00

Jumlah realisasi anggaran tahun 2024 = Rp3.550.786.277,00

SS.1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel Dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi Untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, Dan Berkeadilan
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2024	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel Dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi Untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, Dan Berkeadilan
1b-CP	Indeks Integritas

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2024	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa
2a-N	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada) 	tidak ada (IKU baru) v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2024	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2024	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa
2c-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2024	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien
3a-N	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2024	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2024	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif
4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2024	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif
5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2024	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2024	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.6	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional
6a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2024	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif
7a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2024	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif
7b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2024	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.7	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif
7c-N	Persentase Penyelesaian Program Kerja Duta Transformasi

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2024	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.8	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
8a-CP	Indeks Kinerja Anggaran

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2024	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.8	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
8b-N	Persentase Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2024	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.9	Komunikasi Publik yang Efektif
9a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2024	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.9	Komunikasi Publik yang Efektif
9b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2024	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.10	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah
10a-N	Indeks Efektivitas UKI

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2024	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v

SS.10	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah
10b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM (Unit Tertentu)

Checklist Kelengkapan Narasi IKU:

No.	Kelengkapan	Checklist
1.	Data diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	v
2.	Tujuan/sasaran/indicator sesuai Renstra/Renja	v
3.	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	v
4.	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir - Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi - Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 - Standar Nasional (jika ada) 	v v v tidak ada
5.	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan/atau Renja 2024	v
6.	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	v
7.	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	v